



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Tulang Bawang No. 10 Kel. Imopuro Metro Pusat Kota Metro

REVIU RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA METRO TAHUN 2021-2026



**REVIU RENSTRA
(RENCANA STRATEGIS)**



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA METRO
TAHUN 2021-2026**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menetapkan Renstra OPD setelah disesuaikan dengan RPJMD 2021-2026, oleh karena itu setiap OPD berkewajiban untuk menyusun Renstra OPD.

Reviu Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021-2026 hendaknya dapat merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatar belakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan Reviu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.

Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan Komunikasi dan Informatika senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras (*hardware*) seiring, sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak (*software*) serta pengembangan sumber daya manusia (*brainware*).

Metro, 03 Januari 2022
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA METRO,



SUBEHI. S.STP. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770610 199712 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO TENTANG PENETAPAN RENSTRA TAHUN 2016-2021	iv
KEPUTUSAN WALIKOTA METRO NOMOR : 319/KPTS/B-2/2017 TENTANG PENGESAHAN RENSTRA OPD TAHUN 2016-2021	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro	7
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	31
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi Lampung	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.5 Penentuan Isue–isu Strategis	43

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
BAB VIII PENUTUP	56



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tulang Bawang No.10 Kode Pos 34111 Kota Metro www.metrokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO
NOMOR : 96/KPTS/D-13/01/2021

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KOTA METRO TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan misi RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026, diperlukan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 19 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
17. Keputusan Walikota Metro Nomor 319/KPTS/B-2/05/2017 tanggal 18 April 2017 Tentang Pengesahan Dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021-2026;
- KEDUA** : Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021-2026 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu 2021-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M E T R O
Pada tanggal : 01 September 2021

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA METRO,**


Dra. FARIDA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661117 199203 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan dalam pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil serta ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada.

Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro membidangi komunikasi dan informatika tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat terealisasi dengan baik. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kota Metro.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara

penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD.

Secara umum Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah upaya mendukung Visi Walikota dan Wakil Walikota Metro periode 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”** dan secara umum memuat keseluruhan kebijakan publik sektor Komunikasi dan Informatika di wilayah Kota Metro.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro tahun 2021-2026 berlandaskan pada:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025.
28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 19 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026.
29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
30. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud penyusunan Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021-2026 sebagai tindak lanjut telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Metro tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021-2026 :

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Menetapkan Program dan Kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan;
3. Sebagai acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis capaian yang menjadi landasan penyusunan Program dan kegiatan 5 (lima) tahun mendatang;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Lampung
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isue–isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informasi tipe C dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas, melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Komunikasi Informasi dan Statistik, Bidang Informatika dan Persandian serta penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan perencanaan, penatausahaan keuangan, urusan umum, urusan kepegawaian serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan umum
- e. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan urusa kepegawaian dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pelaporan dan kepegawaian lingkup dinas;
- b. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat;
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas;
- d. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset dinas;
- e. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- g. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

1.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan penatausahaan keuangan dinas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penatausahaan keuangan lingkup dinas.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan meliputi : rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (Renja) dan perencanaan dinas lainnya;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pelaporan meliputi : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup dinas dan laporan dinas lainnya;
- e. Membina penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pelaporan dinas.
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- g. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas;

- h. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
- i. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan;
- j. Menyusun laporan keuangan dinas, meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan dan Berkala, serta laporan keuangan lainnya;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2. BIDANG KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK

Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Komunikasi, Informasi dan Statistik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik mempunyai fungsi pengelolaan pelayanan informasi dan Statistik, Pemberdayaan Informasi dan Kemitraan Media dan penyelenggaraan Kehumasan dan Dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik dipimpin oleh seorang kepala bidang dan membawahi 3 kepala seksi yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

2.1 Seksi Pelayanan Informasi dan Statistik

Seksi Pelayanan Informasi dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan Statistik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan Informasi dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi dan statistik;
- b. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pelayanan informasi dan statistik;
- c. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi dan pelayanan informasi publik serta pengembangan statistik sektoral dalam lingkup Pemerintah Kota Metro;
- d. Melaksanakan pelayanan informasi Publik dan koordinasi serta fasilitasi penyelenggaraan kerjasama pengembangan statistik sektoral seluruh perangkat daerah;

- e. Menyiapkan kegiatan pembuatan Daftar informasi Publik (DIP);
- f. Menyiapkan kegiatan penyelenggaraan pusat informasi publik;
- g. Menyiapkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- h. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan statistik sektoral;
- i. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka perencanaan teknis data statistik dan informasi.
- j. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama pengembangan statistik daerah;
- k. Penyelenggaraan statistik daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Metro;
- l. Menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus untuk pengumpulan data.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Seksi Pemberdayaan Informasi dan Kemitraan Media

Seksi Pemberdayaan Informasi dan Kemitraan Media mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik dalam melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan informasi dan kemitraan media. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Informasi dan Kemitraan Media mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kebijakan dan petunjuk teknis seksi Pemberdayaan Informasi dan Kemitraan Media;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Pemberdayaan informasi dan kemitraan media;
- c. Melaksanakan penyiapan sarana prasarana pendukung penyebaran informasi;
- d. Melakukan pembinaan, Pemberdayaan informasi dan kemitraan media;
- e. Melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan media massa, cetak dan Elektronik;
- f. Mempublikasikan berita dan informasi tentang pembangunan serta kebijakan pemerintah daerah melalui media massa, media tradisional dan media sosial;

- g. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, prestasi dan program pemerintah daerah melalui media luar ruang;
- h. Menerbitkan bahan dokumentasi informasi publik melalui majalah, buletin, tabloid, leaflet, pamflet, booklet, kalender, kliping berita dan sejenisnya;
- i. Menyiapkan pelaksanaan iklan layanan masyarakat;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.3 Seksi Kehumasan dan Dokumentasi

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Kehumasan dan Dokumentasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kehumasan dan Dokumentasi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis bidang Kehumasan dan Dokumentasi;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data tentang pengelolaan Kehumasan dan Dokumentasi;
- c. Menyusun petunjuk teknis pengelolaan Kehumasan dan Dokumentasi;
- d. Melaksanakan pembinaan Kehumasan dan Dokumentasi;
- e. Melaksanakan fungsi kehumasan pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan koordinasi kehumasan pada unit kerja pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan jumpa pers dan dialog publik;
- h. Melaksanakan peliputan, pendokumentasian dan pembuatan press release kegiatan Pemerintahan dan pembangunan Kota Metro serta mempublikasikan dalam halaman situs web dan media sosial;
- i. Mempromosikan potensi dan hasil pembangunan daerah;
- j. Melaksanakan pameran promosi pembangunan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Informatika Dan Persandian

Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis, kebijakan dan operasional pada bidang Informatika dan persandian, pengelolaan sumberdaya informatika, Pengamanan Informasi dan Persandian, dan pengelolaan aplikasi informatika Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 Kepala Seksi yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

3.1 Seksi Sumberdaya Informatika

Seksi Sumberdaya Informatika mempunyai tugas pokok, membangun dan mengelola infrastruktur, mengelola jaringan komputer yang menghubungkan seluruh unit kerja yang dapat digunakan dalam beberapa aplikasi yaitu jaringan internet, jaringan sistem informasi, akses audio visual, serta pelayanan dan pembinaan di bidang sumberdaya informatika dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Sumberdaya Informatika;
- b. Penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur serta perangkat keras di bidang teknologi informasi;
- c. Melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan jaringan internet dan komputer antar unit kerja;
- d. Memasang dan memelihara sarana dan perangkat untuk melaksanakan komunikasi data berupa file audio maupun visual;
- e. Menyediakan akses internet pada setiap OPD, kelurahan dan Fasilitas Publik;
- f. Memberikan rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) dalam lingkup kota;
- g. Memberikan rekomendasi izin untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi;
- h. Memberikan Rekomendasi izin radio;
- i. Mengelola CCTV dan Wifi publik;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

3.2 Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian

Seksi Pengamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengembangkan perangkat lunak (sistem informasi), penerapan aplikasi sistem informasi dan pengelolaan data, dan persandian sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah serta pelayanan dan pembinaan di bidang pengembangan sistem informasi, data dan persandian dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan keamanan informasi dan persandian di lingkungan pemerintah daerah;
- b. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
- c. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
- d. Penyusunan peraturan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- e. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
- f. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- g. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- h. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- i. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

- j. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- k. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- l. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian serta unsur pengelola dan pengguna dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
- m. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota;
- n. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- o. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan sistem elektronik Pemerintah Daerah;
- p. Pelaksanaan pengamanan data, backup data, pemeliharaan dan penyimpanan sistem dan Data Center (DC);
- q. Pemulihan data atau sistem (recovery data dan informasi) jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi dengan layanan Disaster Recovery Center (DRC);
- r. Melakukan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- s. Menyelenggarakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- t. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3.3 Seksi Aplikasi Informatika

Seksi Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok mendesign, mengembangkan dan melaksanakan program situs web Pemerintah Daerah dengan memperbarui berita dan data, membina situs web milik unit kerja lain serta pelayanan dan pembinaan di bidang aplikasi informatika dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Aplikasi Informatika;

- b. Membuat dan mengembangkan aplikasi situs web milik Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- c. Mengelola nama domain dan subdomain untuk seluruh unit kerja, yang terintegrasi dalam situs web milik Pemerintah Daerah;
- d. Mengelola perangkat dan konten Command center;
- e. Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap operator situs web pada Perangkat Daerah;
- f. Menyelenggarakan dan menyusun kebijakan, standar, pedoman dan prosedur serta melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- g. Mengelola perangkat mainframe dan server data base;
- h. Melaksanakan analisis kebutuhan terhadap aplikasi perangkat lunak serta penerapannya dalam lingkup pemerintah daerah;
- i. Menerima dan melaksanakan terhadap permohonan kebutuhan aplikasi perangkat lunak dari instansi lain;
- j. Melaksanakan perancangan dan pembuatan aplikasi perangkat lunak dan penempatan dalam server milik Pemerintah Daerah atau sewa pada pihak lain, baik secara online atau offline;
- k. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data serta mengelola sistem data elektronik;
- l. Melakukan pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak baru maupun yang telah ada;
- m. Mengelola pemanfaatan dan keamanan aplikasi sistem informasi;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah

UPT Radio Siaran Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang teknis Dinas Kominfo. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

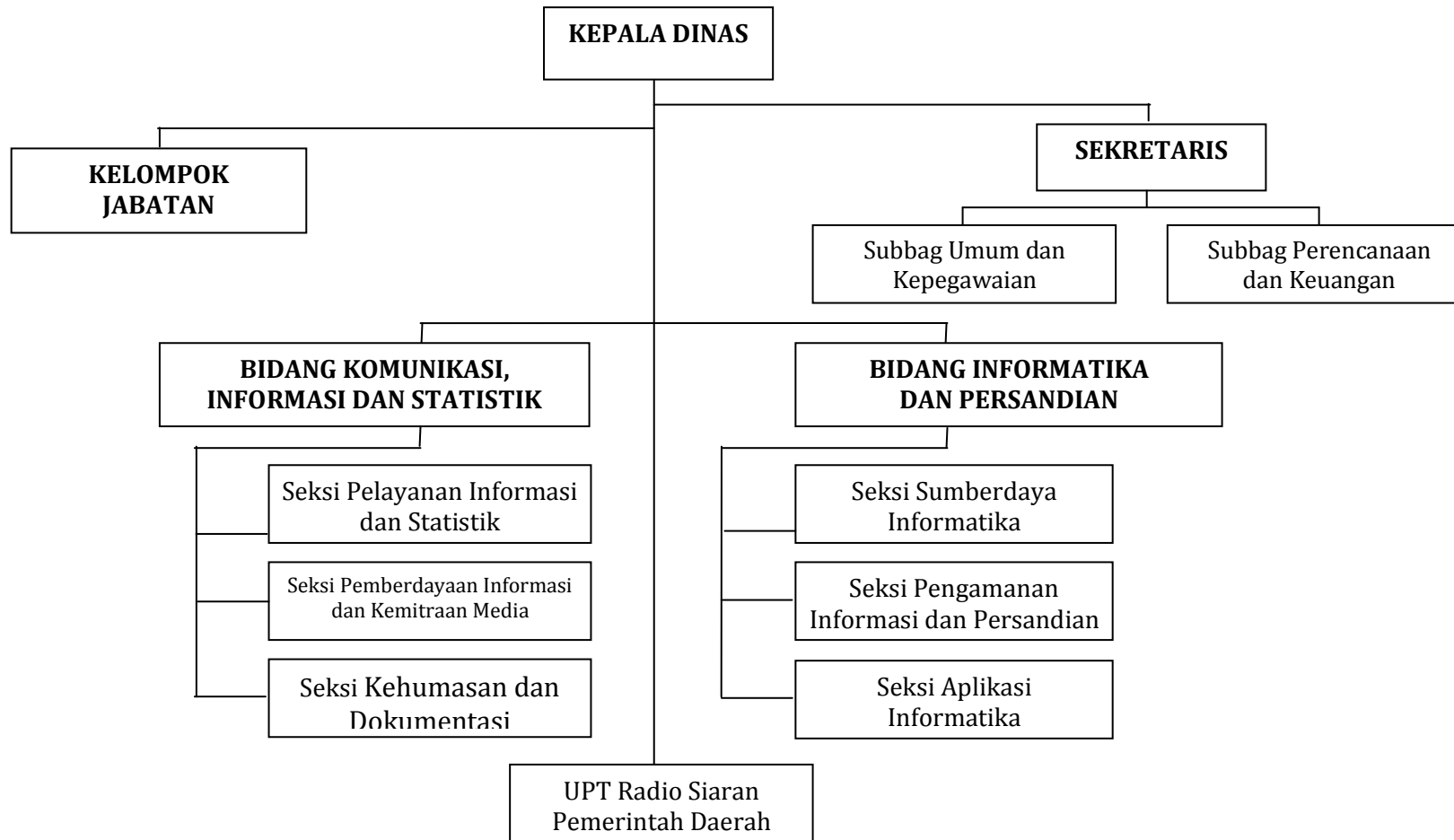
- a. Penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah ;

- d. Pelaksanaan penyebarluasan informasi kebijakan pemerintah daerah dan promosi daerah melalui sarana komunikasi radio dan televisi ;
- e. Pelayanan kegiatan yang menggunakan jasa penyiaran radio pemerintah daerah:
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, dapat digambarkan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro sampai dengan bulan Mei 2021, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro sebanyak 66 (Enam Puluh Enam) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang, Tenaga Kontrak Kerja sebanyak 41 (Empat Puluh Satu), dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Komposisi Status Kepegawaian
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	25 Orang	38 %
2	CPNS	0 Orang	0 %
3	Tenaga Kontrak/Honorar	41 Orang	62 %
JUMLAH		66 Orang	100 %

b. Komposisi Jabatan PNS

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Komposisi Jabatan PNS
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021

No.	Jabatan	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Administrator	4 Orang	16 %
2	Jabatan Pengawas	9 Orang	36 %
3	Jabatan Fungsional Umum	12 Orang	48 %
JUMLAH		25 Orang	100%

c. Komposisi Eselonisasi PNS

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Komposisi Eselonisasi PNS
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II a	1 Orang	8 %
2	Eselon III a	1 Orang	8 %
3	Eselon III b	2 Orang	15 %
4	Eselon IV a	9 Orang	69 %
JUMLAH		13 Orang	100%

d. Komposisi PNS berdasarkan Golongan Ruang

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai berdasarkan Komposisi PNS Golongan Ruang
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021

No.	Golongan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Golongan IV	5 Orang	20 %
2	Golongan III	16 Orang	64 %
3	Golongan II	4 Orang	16 %
4	Golongan I	0 Orang	0 %
JUMLAH		25 Orang	100%

e. Komposisi PNS berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai berdasarkan Komposisi PNS berdasarkan Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD	0 Orang	0 %
2	SMP	0 Orang	0 %
3	SMA	3 Orang	12 %
4	D III	3 Orang	12 %
5	S1	14 Orang	56 %
6	S2	5 Orang	20 %
JUMLAH		25 Orang	100%

f. Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai berdasarkan Komposisi THL berdasarkan Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD	0 Orang	0 %
2	SMP	0 Orang	0 %
3	SMA	25 Orang	61 %
4	D III	10 Orang	24 %
5	S1	6 Orang	15 %
6	S2	0 Orang	0 %
JUMLAH		41 Orang	100%

g. Komposisi pegawai berdasarkan gender

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai berdasarkan Komposisi pegawai berdasarkan gender
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021

No.	Gender	Jumlah	Prosentase
1	Laki-Laki	36 Orang	55 %
2	Perempuan	30 Orang	45 %
JUMLAH		66 Orang	100%

2.2.2. Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro dapat dilihat pada lampiran 1.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Kota Metro, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebelumnya di jalankan oleh 3 (Tiga) OPD yaitu :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Metro (Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika);
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro (Urusan Bidang Statistik);
3. Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Metro (Urusan Bidang Persandian);

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada ketiga OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Metro dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Tabel 2.8
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
Kota Metro Tahun 2019–2020

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2019	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
II	ASPEK PELAYANAN UMUM		
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
10	Komunikasi dan Informatika		
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	11 KIM	11 KIM
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	68,74 Km ²	68,74 Km ²
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	88,1%	85,8%
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	30.968 RT	32.896 RT
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	15.778 RT	17.867 RT

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan adalah Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berjumlah 22 tersebar di 22 Kelurahan di Kota Metro. Semakin banyak jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) maka menggambarkan penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan berjalan 2 (Dua) arah.
- b. Cakupan Layanan Telekomunikasi adalah cakupan layanan untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Layanan tekomunikasi mencakup kegiatan penyelenggaraan jasa telepon dasar (telepon, telegrap, teleks, dan faksimili), jasa nilai tambah telepon (jasa jaringan pintar, kartu panggil, jasa-jasa teknologi interaktif, dan radio panggil untuk umum), jasa multimedia (VoIP, internet, komunikasi data, konferensi video, dan jasa video hiburan).

Cakupan layanan Telekomunikasi (Telepon dan Jaringan Internet) telah mencapai 68,74 Km² (100%) dari total luas wilayah Kota Metro yaitu 68,74 Km².

- c. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah jumlah individu yang menggunakan HP/Telepon. Pada tahun 2019 berjumlah 133.743 jiwa (88,1%) dari total penduduk Kota Metro sejumlah 151.808 Jiwa, sedangkan Tahun 2020 berjumlah 135.569 jiwa (85,8%) dari 157.970 Jiwa total penduduk Kota Metro.
- d. Proporsi rumah tangga dengan akses internet adalah jumlah rumah tangga dengan asumsi terdiri dari ayah, ibu dan anak (3 Orang) dengan fasilitas akses internet. Pada Tahun 2019 Jumlah penduduk yang mengakses internet sejumlah 92.906 jiwa/3 = 30.968 Rumah tangga dari 42.760 jumlah Rumah Tangga di Kota Metro, sedangkan di tahun 2020 Jumlah penduduk yang mengakses internet sejumlah 98.690 jiwa/3 = 32.896 Rumah tangga dari 42.590 jumlah Rumah Tangga di Kota Metro.
- e. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi. Pada Tahun 2019 berjumlah 15.778 Rumah tangga dari 42.760 jumlah Rumah Tangga di Kota Metro, sedangkan di tahun 2020 berjumlah 17.867 Rumah tangga dari 42.590 jumlah Rumah Tangga di Kota Metro.

2. Urusan Bidang Statistik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik.

Perkembangan capaian kinerja pembangunan daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kota Metro pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Kota Metro Tahun 2019–2020

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2019	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
II	ASPEK PELAYANAN UMUM		
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
14	Statistik		
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada/tidak
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada/tidak
14.3	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada/tidak

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sistem data dan statistik terintegrasi tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, dengan alamat website : www.data.metrokota.go.id. Semakin banyak data informasi yang terupload pada website, semakin baik juga proses diseminasi informasi di Kota Metro.
- b. Buku "Kota Metro dalam Angka" diterbitkan oleh badan Pusat Statistik, sedangkan yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro adalah Buku Data Statistik Sektoral yang berisi tentang kondisi eksisting seluruh Perangkat Daerah di Kota Metro.
- c. Buku "PDRB" tidak tersedia pada Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

3. Urusan Bidang Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari

jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah.

Tabel 2.10
Perkembangan Kinerja Pembangunan Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
Kota Metro Tahun 2019–2020

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	TAHUN 2019	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
II	ASPEK PELAYANAN UMUM		
B	Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
15	Persandian		
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Ada/ tidak	Ada/ tidak

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tahun 2019 Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah berjumlah 1 OPD dari 33 Opd atau 3%, sedangkan Pada Tahun 2020 Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah berjumlah 1 OPD dari 33 Opd atau 3%.

Tabel 2.10
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA METRO

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Lokasi yang terlayani dengan Jaringan Internet	15 Titik	15 Titik	15 Titik	15 Titik	100	100
2	Jumlah Publikasi Informasi Pembangunan	220 Berita	250 Berita	250 Berita	270 Berita	113,64	108,00
3	Jumlah Data Statistik Daerah yang diPublikasikan	55	55	55	55	100	100
4	Jumlah Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	1	1	1	1	100	100

Tabel 2.11
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA

NO	Uraian	Target Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Tahun Ke-		Rasio Target dan Realisasi pada Tahun ke- (%)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	778.172.000,-	981.849.700,-	775.649.917,-	850.265.710,-	99,68	86,60
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	267.393.000,-	223.534.400,-	267.369.000,-	211.762.500,-	99,99	94,73
3	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	8.363.000,-	53.639.600,-	8.363.000,-	53.639.600,-	100	100
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.343.492.000,-	1.786.069.013,-	1.328.788.471,-	1.777.873.093,-	98,91	99,54
5	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	3.368.767.600,-	3.664.008.600,-	3.358.190.375,-	3.646.836.000,-	99,69	99,53
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa masyarakat	65.957.000,-	714.713.931,-	65.395.131,-	674.933.216,-	99,15	94,43
7	Program Promosi Pembangunan Daerah	441.164.000,-	55.249.300,-	440.987.400,-	55.249.300,-	99,96	100
8	Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah	34.396.000,-	0,-	33.870.000,-	0,-	98,47	0

9	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	23.492.900,-	21.538.900,-	22.718.900,-	20.438.900,-	96,71	94,89
10	Program Pengembangan e-Goverment	200.961.500,-	119.796.000,-	200.755.108,-	119.522.177,-	99,90	99,77
	JUMLAH	6.532.165.000,-	7.620.399.444,-	6.502.088.202,-	7.410.520.496,-	99,54	97,25

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 5 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan TIK di Kota Metro, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Kominfo sebagai pusat data center di Kota Metro, tentu saja perlu dorongan positif dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM berkualitas yang dapat mengaplikasikan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut

1. Belum optimalnya penyelenggaraan e-government;
2. Pengelolaan website Pemerintah Kota dan Perangkat daerah terintegrasi dan terupdate;
3. Konten hoax yang beredar di masyarakat;
4. Semakin cerdasnya masyarakat terkait kebutuhan akan informasi (Keberadaan UU no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik);
5. Ketidaksiapan badan publik dalam menghadapi permintaan informasi;
6. Jaminan keamanan sistem TIK;
7. Belum tersedianya satu data yang terintegrasi;
8. Masih rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional khususnya yang menguasai bidang IT (Analisis, Aplikasi, Database, Pemrograman dan Jaringan).

2.4.2. Peluang

Adapun peluang yang bisa memberikan proses berkembangnya bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro di masa depan antara lain :

1. Kemajuan teknologi informasi;
2. Keinginan yang tinggi dari masyarakat untuk memperoleh informasi;

3. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat;
4. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunikasi);
5. Media massa, elektronik dan online yang sangat berkembang baik milik pemerintah maupun swasta;
6. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif;
7. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika di Kota Metro menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu :

a. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Metro;
2. Belum optimalnya penyebaran informasi citra positif pemerintah di media massa untuk menangkal berita hoax;
3. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
4. Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebaran informasi program dan kegiatan pemerintah;
6. Belum optimalnya pelaksanaan standart layanan informasi publik di badan publik lingkungan pemerintah Kota Metro;
7. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE;
8. Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju e-commerce;

10. Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart City;
11. Masih terbatasnya sumber daya yang memadai di bidang layanan komunikasi dan informatika.

b. Urusan Bidang Statistik

1. Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
2. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
3. Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
4. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.

c. Urusan Bidang Persandian

1. Belum optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Metro;
2. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
4. Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro harus mengacu pada visi misi dan program Walikota Metro. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Metro tertuang dalam RPJMD Kota Metro tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KOTA METRO BERPENDIDIKAN, SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA”.

Makna substantif dari visi diatas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut :

1. Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan

dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat Intelligence Quotient atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); Spiritual Quotient atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); dan Emotional Quotient atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat).

2. Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan local. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

3. Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian local yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian local dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kota Metro Berbudaya

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (Lima) Misi pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaanyang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Terhormat, dan Bermartabat.

Dalam kelima Misi di atas yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro dan selaras dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke 5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Terhormat, dan Bermartabat.”

Komitmen perwujudan Misi 5 akan dilaksanakan melalui :

1. Meningkatkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan, akurat, serta berkala kepada masyarakat, terkait kinerja pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta manajemen pegawai;
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pelayanan public dan pelayanan birokrasi dengan mengedepankan prinsip *good governance*.

Sedangkan untuk Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro yaitu :

1. Penerapan *e-Government* secara menyeluruh untuk pelayan yang lebih baik, cepat, tepat, dan efisien.
2. Penguatan Database Terintegrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan.
3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintahan yang Terhormat dan Bermartabat.
4. Implementasi *Open Government* dengan prinsip transparansi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Lampung

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Presiden Joko Widodo dengan jelas memberikan arahan bahwa kita harus membajak momentum pandemi COVID-19 dan melakukan lompatan besar sebagai upaya nyata untuk membangkitkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Arahan tersebut direalisasikan dengan mempercepat agenda transformasi digital nasional melalui 5 (lima) langkah yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital. Lima langkah percepatan transformasi digital yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi fondasi bagi pengembangan roadmap Indonesia Digital.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud, antara lain :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional;

3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020-2024, mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu ***“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”***

Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Kementrian Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan 7 (Tujuh) Agenda pembangunan nasional, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga

tujuan utama Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sasaran Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Untuk mewujudkan Tujuan di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, antara lain :

1. Perlunya penguatan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Provinsi Lampung dengan peran seluruh Perangkat Daerah dengan peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai koordinator;

2. Perlunya penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet lingkup Pemerintah Provinsi Lampung pada semua Perangkat Daerah;
3. Peningkatan komitmen dan implementasi e-Government Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Percepatan pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Lampung melalui penerapan seluruh aplikasi yang telah disiapkan;
5. Peningkatan penyediaan layanan informasi website online yang up to date secara terkoordinasi sehingga domain masing-masing Perangkat Daerah akan berada di bawah domain www.lampungprov.go.id;
6. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman dan handal;
7. Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat secara mudah;
8. Pembentukan komunikasi informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
9. Menjamin ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat;
10. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan.

Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung mengacu kepada Visi pembangunan Daerah Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu ***"Rakyat Lampung Berjaya."***

Visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

- a) Kehidupan masyarakat yang ***aman***. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan

berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

- b) Kehidupan masyarakat yang **berbudaya**. Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya, yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.
- c) Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan public yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
- d) Kehidupan yang **sejahtera**. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Dalam rangka mencapai visi "Rakyat Lampung Berjaya" tersebut, maka misi pembangunan daerah tahun 2019–2024 ditetapkan sebagai berikut :

1. Misi-1 : Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Misi-2 : Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Misi-3 : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
4. Misi-4 : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Misi-5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

6. Misi-6 : Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Lampung, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung telah memetakan Arah Pembangunan Daerah ke dalam (3) tiga tujuan utama sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian, antara lain :

1. Mendukung agenda kerja **“Smart Village”** : meningkatkan literasi internet dan layanan perpustakaan desa, digitalisasi, administrasi desa dan e-participation;
2. Mendukung agenda kerja **“Smart School”** : pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pendidikan”;
3. Mendukung agenda kerja Infrastruktur Lampung Berjaya : konektivitas antar Kabupaten/Kota untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru, infrastruktur untuk kawasan wisata, infrastruktur pertanian, pelabuhan dan infrastruktur telekomunikasi, dan agenda kerja Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan infrastruktur: berbasis peran warga dan pemanfaatan IT.
4. Mendukung agenda kerja “Kartu Petani Berjaya (KPB) : memberikan jaminan kepada para petani untuk mendapatkan bibit, pupuk, pasar, modal dan beasiswa bagi anak petani (pertanian secara luas)”.

Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Untuk mewujudkan Tujuan di atas, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian untuk tahun 2019-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas implementasi e-government;
2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
3. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2030. Adapun tujuan penataan ruang di Kota Metro adalah “Mewujudkan Ruang Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan Yang Berbudaya Bertaraf Nasional”.

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro berdasarkan Sasaran Renstra Kajian Lingkungan yaitu belum meratanya penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat Kota Metro. Kota Metro yang hanya terdiri dari Lima Kecamatan dan sebaran penduduknya hampir merata di Lima Kecamatan pada dasarnya bisa sebagai sarana untuk Pengembangan Informasi dan Komunikasi.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemerintah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar yang terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS ini selanjutnya wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan program pembangunan daerah, salah satunya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan KLHS RPJMD berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) termuat dalam Rancangan RPJMD Kota Metro. Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi KLHS, yakni penguatan pelaksanaan dan pengawasan program-program ramah lingkungan yang telah direncanakan, salah satunya pengawasan pemanfaatan ruang terkait pengembangan infrastruktur telekomunikasi.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan, dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

- 1) One Map One Data;
- 2) Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Metro (SPBE);
- 3) Semakin berkembangnya TIK yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan penyelenggaraan SPBE;
- 4) Belum Optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya Smart City;
- 5) Keterbukaan Informasi Publik;
- 6) Integrasi data statistik sektoral daerah.
- 7) Pengamanan Informasi dan Persandian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap yang strategis, menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Metro. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo Kota Metro harus sejalan dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Metro, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Metro.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Komunikasi Publik;

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Kominfo Kota Metro;
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Berikut tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Metro tahun 2021-2026 pada tabel 4.1 berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Komunikasi Publik		Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Metro	3,10 Poin	3,20 Poin	3,30 Poin	3,40 Poin	3,50 Poin
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Metro	65,50 Poin	70,50 Poin	75,50 Poin	78,50 Poin	80,10 Poin
1		Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Kominfo Kota Metro	Rata-Rata Nilai Akuntabilitas Dinas Kominfo Kota Metro	75,50 Poin	76,50 Poin	77,50 Poin	78,50 Poin	80,00 Poin
2		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang diumumkan	100 Informasi	120 Informasi	120 Informasi	150 Informasi	150 Informasi
			Jumlah Permohonan Informasi Publik	20 PIP	30 PIP	30 PIP	35 PIP	35 PIP
			Jumlah Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	120 Kali	150 kali	150 Kali	185 Kali	185 Kali
			Jumlah data statistik sektoral Lingkup Kota Metro	33 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan)	33 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan)	33 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan)	33 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan)	33 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan)
3		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Indikator Kebijakan SPBE	10 Indikator	10 Indikator	10 Indikator	10 Indikator	10 Indikator
			Jumlah Indikator Tata kelola SPBE	10 Indikator	10 Indikator	10 Indikator	10 Indikator	10 Indikator
			Jumlah Indikator Layanan SPBE	11 Indikator	11 Indikator	11 Indikator	11 Indikator	11 Indikator
			Jumlah Indikator Ma SPBE	16 Indikator	16 Indikator	16 Indikator	16 Indikator	16 Indikator
			Jumlah implementasi keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah lingkup Kota Metro	6 OPD dan 1 Jenis Layanan	7 OPD dan 1 Jenis Layanan	6 OPD dan 1 Jenis Layanan	6 OPD dan 1 Jenis Layanan	7 OPD dan 1 Jenis Layanan

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro telah sejalan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke 5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Terhormat, dan Bermartabat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Hal tersebut diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah, pada ketentuan umum pasal 1, disebutkan bahwa :

- a) Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran;
- b) Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro

Visi : Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya			
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>), Terhormat, dan Bermartabat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Kominfo Kota Metro	Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Dinas Kominfo Kota Metro	Peningkatan Tata kelola Sistem Akuntabilitas Dinas Kominfo Kota Metro
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika	Peningkatan Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemda
			Peningkatan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemda
			Peningkatan Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City
			Peningkatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen yang Terintegrasi
			Peningkatan Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda
			Peningkatan Layanan Infra Struktur Dasar data Center, Disaster Recovery Center dan TIK

		Meningkatkan Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pengembangan Layanan Keamanan Informasi
	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa
			Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media
			Peningkatan Produksi Konten Informasi Publik
			Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat
			Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan informasi Publik
		Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Desiminasi data Statistik Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan dan selaras dengan RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 1.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 1.1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 1.2.3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 1.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 1.2.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 - 1.3.5. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 1.3.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 1.3.7. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - 1.3.8. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

- 1.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 1.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 1.6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media.
 - 2.1.7. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
 - 2.1.8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

- 3.2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik.
 - 3.2.3. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - 3.2.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
 - 3.2.5. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
 - 3.2.6. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral.
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.
 - 4.1.3. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
 - 5.1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 5.2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Metro. Target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro dalam 5 (lima) tahun ke depan yakni mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Metro 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Metro.
2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Metro.
3. Indeks Ketersediaan Data di Kota Metro
4. Indeks Pengamanan Informasi Kota Metro

Indikator kinerja tersebut di atas dapat dilihat pada table 7.1 di bawah ini:

No	Indikator	Data Capaian Tahun awal Perencanaan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Metro	2,75 Poin	3,10 Poin	3,20 Poin	3,30 Poin	3,40 Poin	3,50 Poin	3,50 Poin
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Metro	60,10 Poin	65,50 Poin	70,50 Poin	75,50 Poin	78,50 Poin	80,10 Poin	80,10 Poin
3	Indeks Ketersediaan Data di Kota Metro	50 Poin	55 Poin	60 Poin	65 Poin	70 Poin	80 Poin	80 Poin
4	Indeks Pengamanan Informasi Kota Metro	0 Poin	45 Poin	55 Poin	65 Poin	70 Poin	75 Poin	75 Poin

BAB VII

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021-2026 yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun demikian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kota Metro Tahun 2021-2026, yaitu: **“TERWUJUDNYA KOTA METRO BERPENDIDIKAN, SEHAT, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA”** dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2021-2026 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kota Metro dalam RPJMD Kota Metro 2021-2026.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO

Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Kode Rekening	Urusan. Urusan Bidang Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD penanggung Jawab	Lokasi				
										Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
										Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target	Rp (000)		
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Komunikasi Publik			Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Kominfo Kota Metro	Rata-Rata Nilai Akuntabilitas Dinas Kominfo Kota Metro	80,00				74,78	75,50		76,50		77,50		78,50		80,00		80,00					
			Meningkatnya Tata Kelola Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.16.01.	PROGRAM Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Dinas Kominfo	Kota Metro		
			Terpenuhinya Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.16.01.2.01.	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	Dinas Kominfo	Kota Metro	
			Terpenuhinya Tata Kelola Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	2.16.01.2.01.01.	SUB KEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	33 Dokumen	140.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
			Terpenuhinya Tata Kelola Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	2.16.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA dan DPA Dinas yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	24 Dokumen	100.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
			Terpenuhinya Tata Kelola Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	2.16.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	17 Dokumen	250.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
			Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.16.01.2.02.	KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Personil dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 ASN 40 THL 2 THL IT 17 Orang 3 Laporan	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 20 Laporan	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 20 Laporan	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 20 Laporan	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 20 Laporan	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 20 Laporan	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 20 Laporan	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 20 Laporan	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 20 Laporan	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 20 Laporan	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 20 Laporan	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 20 Laporan	26 ASN 40 THL 2 THL IT 20 Orang 103 Laporan	Dinas Kominfo	Kota Metro		
							SUB KEGIATAN			4.825.000	4.825.000	5.655.000	5.655.000	6.535.000	6.535.000	7.310.000	7.310.000	7.670.000	7.670.000	7.670.000	7.670.000				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Terpenuhinya Tata Kelola Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Gaji dan Tunjangan ASN	100%	2.16.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan	26 ASN	3.500.000	26 ASN	4.000.000	26 ASN	4.500.000	26 ASN	5.000.000	26 ASN	5.000.000	26 ASN	5.000.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	2.16.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji	40 THL 2 THL IT	1.000.000	40 THL 2 THL IT	1.200.000	40 THL 2 THL IT	1.500.000	40 THL 2 THL IT	1.700.000	40 THL 2 THL IT	2.000.000	40 THL 2 THL IT	2.000.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
	Terpenuhinya Tata Kelola Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	2.16.01.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pengelola Penatausahaan Keuangan	17 Orang	200.000	20 Orang	300.000	20 Orang	350.000	20 Orang	400.000	20 Orang	450.000	20 Orang	450.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
	Terpenuhinya Tata Kelola Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	2.16.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	50.000	2 Laporan	55.000	2 Laporan	60.000	2 Laporan	70.000	2 Laporan	75.000	11 Laporan	75.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
	Terpenuhinya Tata Kelola Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	2.16.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Pelaporan Keuangan Semesteran yang tersusun	2 Laporan	75.000	18 Laporan	100.000	18 Laporan	125.000	18 Laporan	140.000	18 Laporan	145.000	92 Laporan	145.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
					KEGIATAN			1.050.000		1.310.000		1.600.000		1.815.000		1.905.000		1.905.000		
	Terpenuhinya Tata Kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah	139 Jenis 15 Kali	1.050.000	150 Jenis 25 Kali 200 Arsip 5 Aksi	1.310.000	150 Jenis 25 Kali 200 Arsip 5 Aksi	1.600.000	150 Jenis 25 Kali 200 Arsip 5 Aksi	1.815.000	150 Jenis 25 Kali 200 Arsip 5 Aksi	1.905.000	889 Jenis 25 Kali 200 Arsip 5 Aksi	1.905.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
					SUB KEGIATAN			1.050.000		1.310.000		1.600.000		1.815.000		1.905.000		1.905.000		
	Terpenuhinya Tata Kelola Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	2.16.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Listrik Kantor	16 Jenis	50.000	20 Jenis	55.000	20 Jenis	60.000	20 Jenis	65.000	20 Jenis	70.000	116 Jenis	70.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
	Terpenuhinya Tata Kelola Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	2.16.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Jenis	250.000	15 Jenis	300.000	15 Jenis	400.000	15 Jenis	450.000	15 Jenis	450.000	89 Jenis	450.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
	Terpenuhinya Tata Kelola Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	2.16.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Ketersediaan Peralatan Rumah Tangga	0	80.000	5 Jenis	100.000	5 Jenis	150.000	5 Jenis	200.000	5 Jenis	200.000	25 Jenis	200.000	Dinas Kominfo	Kota Metro

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
	Terpenuhinya Tata Kelola Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	2.16.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Ketersediaan Alat Kebersihan, ATK dan makan Minum Kantor	100 Jenis	100 Jenis	170.000	100 Jenis	175.000	100 Jenis	180.000	100 Jenis	185.000	100 Jenis	185.000	600 Jenis	185.000	Dinas Kominfo	Kota Metro		
	Terpenuhinya Tata Kelola Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	2.16.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Ketersediaan Barang Cetak dan Fotocopy	9 Jenis	10 Jenis	50.000	10 Jenis	80.000	10 Jenis	85.000	10 Jenis	90.000	10 Jenis	100.000	59 Jenis	100.000	Dinas Kominfo	Kota Metro		
	Terpenuhinya Tata Kelola Perjalanan Dinas Daerah	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Perjalanan Dinas Daerah	100%	2.16.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilakukan	15 Kali	25 Kali	100.000	25 Kali	150.000	25 Kali	175.000	25 Kali	200.000	25 Kali	200.000	140 Kali	200.000	Dinas Kominfo	Kota Metro		
	Terpenuhinya Tata Kelola Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	2.16.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola	0	200 Arsip	50.000	200 Arsip	100.000	200 Arsip	150.000	200 Arsip	175.000	200 Arsip	200.000	1000 Arsip	200.000	Dinas Kominfo	Kota Metro		
	Terpenuhinya Tata Kelola Dukungan SPBE di Kota Metro	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Dukungan SPBE di Kota Metro	100%	2.16.01.2.06.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aksi yang dilakukan	0	5 Aksi	300.000	5 Aksi	350.000	5 Aksi	400.000	5 Aksi	450.000	5 Aksi	500.000	25 Aksi	500.000	Dinas Kominfo	Kota Metro		
					KEGIATAN					200.000		200.000		200.000		200.000		200.000					
	Terpenuhinya Tata Kelola Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diperoleh	0	1 Gedung	200.000	1 Gedung	200.000	1 Gedung	200.000	1 Gedung	200.000	1 Gedung	200.000	1 Gedung	200.000	1 Gedung	200.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
					SUB KEGIATAN					200.000		200.000		200.000		200.000		200.000					
	Terpenuhinya Tata Kelola Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	2.16.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terbangun	0	1 Gedung	200.000	1 Gedung	200.000	1 Gedung	200.000	1 Gedung	200.000	1 Gedung	200.000	1 Gedung	200.000	1 Gedung	200.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
					KEGIATAN					177.000		192.500		218.000		233.500		238.500					
	Terpenuhinya Tata Kelola Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	610 Materai 2 Rekening	700 Materai 4 Rekening 20 Kali	177.000	750 Materai 4 Rekening 20 Kali	192.500	800 Materai 4 Rekening 20 Kali	218.000	850 Materai 4 Rekening 20 Kali	233.500	850 Materai 4 Rekening 20 Kali	238.500	4560 Materai 4 Rekening 100 Kali	238.500	Dinas Kominfo	Kota Metro		
					SUB KEGIATAN					177.000		192.500		218.000		233.500		238.500					
	Terpenuhinya Tata Kelola Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.16.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materai Kantor	610 Materai	700 Materai	7.000	750 Materai	7.500	800 Materai	8.000	850 Materai	8.500	850 Materai	8.500	4560 Materai	8.500	Dinas Kominfo	Kota Metro		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Terpenuhinya Tata Kelola Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	2.16.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Rekening yang akan dbayarkan	2 Rekening	4 Rekening	90.000	4 Rekening	100.000	4 Rekening	120.000	4 Rekening	130.000	4 Rekening	130.000	4 Rekening	130.000	Dinas Kominfo Kota Metro
		Terpenuhinya Tata Kelola Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	2.16.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor akan dbayarkan	0	20 Kali	80.000	20 Kali	85.000	20 Kali	90.000	20 Kali	95.000	20 Kali	100.000	100 Kali	100.000	Dinas Kominfo Kota Metro
						KEGIATAN				550.000		580.000		600.000		650.000		750.000		750.000	
		Terpenuhinya Tata Kelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	2.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit 28 Peralatan 1 Fasilitas	7 Unit 30 Peralatan 2 Fasilitas	550.000	7 Unit 30 Peralatan 2 Fasilitas	580.000	7 Unit 30 Peralatan 2 Fasilitas	600.000	7 Unit 30 Peralatan 2 Fasilitas	650.000	7 Unit 30 Peralatan 2 Fasilitas	750.000	7 Unit 178 Peralatan 2 Fasilitas	750.000	Dinas Kominfo Kota Metro
						SUB KEGIATAN				550.000		580.000		600.000		650.000		750.000		750.000	
		Terpenuhinya Tata Kelola Registrasi dan pemeliharaan Kendaraan Dinas	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Registrasi dan pemeliharaan Kendaraan Dinas	100%	2.16.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara	7 Unit	7 Unit	250.000	7 Unit	280.000	7 Unit	300.000	7 Unit	350.000	7 Unit	350.000	7 Unit	350.000	Dinas Kominfo Kota Metro
		Terpenuhinya Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	2.16.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	28 Peralatan	30 Peralatan	150.000	30 Peralatan	150.000	30 Peralatan	150.000	30 Peralatan	150.000	30 Peralatan	250.000	178 Peralatan	250.000	Dinas Kominfo Kota Metro
		Terpenuhinya Tata Kelola Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	2.16.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yang terpelihara	1 Fasilitas	2 Fasilitas	150.000	2 Fasilitas	150.000	2 Fasilitas	150.000	2 Fasilitas	150.000	2 Fasilitas	150.000	2 Fasilitas	150.000	Dinas Kominfo Kota Metro
					2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kota Metro	80,1 Poin	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang diumumkan	150 Informasi	Jumlah Permohonan Informasi Publik	35 PIP	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	185 Kali												
						PROGRAM				5.150.000		5.300.000		5.450.000		5.600.000		5.900.000		5.900.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
	Terpenuhinya Tata Kelola Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100%	2.16.02.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Pengelolaan Informasi dan Pengembangan media komunikasi publik Lingkup OPD	11 KIM 6 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 310 Data 26 SKH 36 SKM 6 Organisasi 210 Berita 2 Kali	10 KIM 20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 55 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 250 Berita 2 Kali	5.150.000	5.300.000	10 KIM 20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 55 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 250 Berita 2 Kali	5.450.000	10 KIM 20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 55 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 250 Berita 2 Kali	5.600.000	10 KIM 20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 55 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 250 Berita 2 Kali	5.900.000	61 KIM 20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 585 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 1460 Berita 2 Kali	5.900.000	Dinas Kominfo	Kota Metro		
					KEGIATAN			5.150.000	5.300.000	5.450.000	5.600.000	5.900.000										
	Terpenuhinya Tata Kelola Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	11 KIM 6 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 310 Data 26 SKH 36 SKM 6 Organisasi 210 Berita 2 Kali	10 KIM 20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 55 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 250 Berita 2 Kali	5.150.000	5.300.000	10 KIM 20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 55 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 250 Berita 2 Kali	5.450.000	10 KIM 20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 55 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 250 Berita 2 Kali	5.600.000	10 KIM 20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 55 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 250 Berita 2 Kali	5.900.000	61 KIM 20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV 1 Radio 585 Informasi 30 SKH 35 SKM 6 Organisasi 1460 Berita 2 Kali	5.900.000	Dinas Kominfo	Kota Metro		
					SUB KEGIATAN			5.150.000	5.300.000	5.450.000	5.600.000	5.900.000										
	Terpenuhinya Tata Kelola Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	100%	2.16.02.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	0 1 Kebijakan	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	5 Kebijakan	200.000	Dinas Kominfo	Kota Metro	
	Terpenuhinya Tata Kelola Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	100%	2.16.02.2.01.02.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang terbentuk	11 KIM 10 KIM	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	61 KIM	300.000	Dinas Kominfo	Kota Metro	
	Terpenuhinya Tata Kelola Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100%	2.16.02.2.01.04.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Informasi yang terpasang dan Jumlah Media yang bekerjasama	6 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV	20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV	1.200.000	1.200.000	20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV	1.200.000	20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV	1.200.000	20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV	1.200.000	20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV	1.200.000	20 Baleho 185 Media Online 6 TV 82 ADV	1.200.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
	Terpenuhinya Tata Kelola Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100%	2.16.02.2.01.05.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik yang diberdayakan	1 Radio	1 Radio	300.000	400.000	1 Radio	500.000	1 Radio	600.000	1 Radio	650.000	1 Radio	650.000	Dinas Kominfo	Kota Metro		
	Terpenuhinya Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik	100%	2.16.02.2.01.06.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah berkas Informasi yang dikelola	310 Berkas	55 Informasi	250.000	300.000	55 Informasi	350.000	55 Informasi	400.000	55 Informasi	400.000	585 Informasi	400.000	Dinas Kominfo	Kota Metro		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		Terpenuhinya Tata Kelola Layanan Hubungan Media	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Layanan Hubungan Media	100%	2.16.02.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Cetak dan Elektronik yang bekerjasama	26 SKH 36 SKM 6 Organisasi	30 SKH 35 SKM 6 Organisasi	2.300.000	30 SKH 35 SKM 6 Organisasi	2.300.000	30 SKH 35 SKM 6 Organisasi	2.300.000	30 SKH 35 SKM 6 Organisasi	2.300.000	30 SKH 35 SKM 6 Organisasi	2.300.000	Dinas Kominfo	Kota Metro		
		Terpenuhinya Tata Kelola Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100%	2.16.02.2.01.10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM yang memahami Komunikasi Publik	0	20 Orang	250.000	20 Orang	250.000	20 Orang	250.000	20 Orang	350.000	100 Orang	350.000	Dinas Kominfo	Kota Metro		
		Terpenuhinya Tata Kelola Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100%	2.16.02.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Release berita yang dihasilkan dan Jumlah event Promosi Pembangunan Daerah	210 Berita 2 Kali	250 Berita 2 Kali	500.000	250 Berita 2 Kali	500.000	250 Berita 2 Kali	500.000	250 Berita 2 Kali	500.000	1460 Berita 2 Kali	500.000	Dinas Kominfo	Kota Metro		
	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Metro	3,50 Poin	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Indikator Kebijakan SPBE yang terpenuhi Jumlah Indikator Tata kelola SPBE yang terpenuhi Jumlah Indikator Manajemen SPBE yang terpenuhi Jumlah Indikator Layanan SPBE yang terpenuhi	10 Indikator 10 Indikator 11 Indikator 46 Indikator																	
		Terpenuhinya Tata Kelola Pengelolaan Aplikasi Informatika	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Pengelolaan Aplikasi Informatika	100%	2.16.03.	PROGRAM Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Pengembangan teknologi informasi Lingkup OPD	4 Aplikasi 15 Titik 160 Lokasi	330 RT 88 RW 1 Pusat Data 1 Website Data 5 Aplikasi	9.550.000	165 RT 40 RW 1 Pusat Data 1 Website Data 5 Aplikasi	9.250.000	165 RT 40 RW 1 Pusat Data 1 Website Data 5 Aplikasi	9.950.000	100 RT 20 RW 1 Pusat Data 1 Website Data 5 Aplikasi	6.000.000	65 RT 20 RW 1 Pusat Data 1 Website Data 5 Aplikasi	5.000.000	825 RT 208 RW 1 Pusat Data 1 Website Data 20 Aplikasi	12.850.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
		Terpenuhinya Tata Kelola Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.16.03.2.01.	KEGIATAN Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan telah terkelola	15 Titik 160 Lokasi	330 RT 88 RW	5.000.000 5.000.000	165 RT 40 RW	4.000.000 4.000.000	165 RT 40 RW	4.000.000 4.000.000	100 RT 20 RW	4.000.000 4.000.000	65 RT 20 RW	5.000.000 5.000.000	825 RT 208 RW	5.000.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
		Terpenuhinya Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	2.16.03.2.01.03.	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Titik Koneksi Internet yang terpasang dan Jumlah lokasi yang terlayani dengan jaringan internet	15 Titik 160 Lokasi	330 RT 88 RW	5.000.000	165 RT 40 RW	4.000.000	165 RT 40 RW	4.000.000	100 RT 20 RW	4.000.000	65 RT 20 RW	5.000.000	825 RT 208 RW	5.000.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
						KEGIATAN				4.550.000		5.250.000		5.950.000		6.700.000		7.350.000		7.850.000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
Meningkatkan Tata Kelola Satu Data di Kota Metro	Indeks Ketersediaan Data di Kota Metro	80,00 Poin	Meningkatnya Ketersediaan Data di Kota Metro	Jumlah data statistik sektoral Lingkup Kota Metro	33 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan)																
			Terpenuhinya Tata Kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	2.20.02.	PROGRAM Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah data statistik sektoral Lingkup Perangkat Daerah	28 Data OPD	33 Data 10 Orang 1 Aplikasi	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	900.000	193 Data 50 Orang 1 Aplikasi	900.000	Dinas Kominfo	Kota Metro	
			Terpenuhinya Tata Kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.20.02.2.01.	KEGIATAN Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	28 Data OPD	33 Data 10 Orang 1 Aplikasi	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	900.000	193 Data 50 Orang 1 Aplikasi	900.000	Dinas Kominfo	Kota Metro	
			Terpenuhinya Tata Kelola Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	100%	2.20.02.2.01.01.	SUB KEGIATAN Kordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Kota Metro	28 Data OPD	33 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan)	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	450.000	193 Data (28 OPD dan 5 Kecamatan)	450.000	Dinas Kominfo	Kota Metro	
			Terpenuhinya Tata Kelola Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100%	2.20.02.2.01.02.	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang paham mutu Statistik Sektoral Kota Metro	0	10 Orang	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	50 Orang	300.000	Dinas Kominfo	Kota Metro	
			Terpenuhinya Tata Kelola Membangun Metadata Statistik Sektoral	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Membangun Metadata Statistik Sektoral	100%	2.20.02.2.01.03.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Aplikasi Metadata Statistik Sektoral	0	1 Aplikasi	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1 Aplikasi	150.000	150.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
						2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN.														
Meningkatkan Keamanan Informasi	Indeks Pengamanan Informasi Kota Metro	75 Poin	Meningkatnya Keamanan Informasi di Kota Metro	Jumlah implementasi keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah lingkup Kota Metro	33 OPD dan 1 Jenis Layanan																
			Terpenuhinya Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	2.21.02.	PROGRAM Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	1 OPD 1 Jenis Layanan	6 OPD 1 Jenis Layanan	200.000	260.000	320.000	380.000	380.000	380.000	33 OPD 1 Jenis Layanan	380.000	Dinas Kominfo	Kota Metro	
							KEGIATAN				150.000	200.000	250.000	300.000	300.000	300.000		300.000			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
	Terpenuhinya Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 5 Orang	150.000	5 Orang	200.000	5 Orang	250.000	5 Orang	300.000	5 Orang	300.000	25 Orang	300.000	300.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
					SUB KEGIATAN			150.000		200.000		250.000		300.000		300.000		300.000			
	Terpenuhinya Tata Kelola Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.21.02.2.01.02.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi	0 5 Orang	150.000	5 Orang	200.000	5 Orang	250.000	5 Orang	300.000	5 Orang	300.000	25 Orang	300.000	300.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
					KEGIATAN			50.000		60.000		70.000		80.000		80.000		80.000			
	Terpenuhinya Tata Kelola Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.21.02.2.02.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 OPD 1 Jenis Layanan	50.000	7 OPD 1 Jenis Layanan	60.000	6 OPD 1 Jenis Layanan	70.000	6 OPD 1 Jenis Layanan	80.000	7 OPD 1 Jenis Layanan	80.000	33 OPD 1 Jenis Layanan	80.000	80.000	Dinas Kominfo	Kota Metro
					SUB KEGIATAN			50.000		60.000		70.000		80.000		80.000		80.000			
	Terpenuhinya Tata Kelola Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Tata Kelola Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.21.02.2.02.01.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan Layanan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi	1 OPD 1 Jenis Layanan	50.000	7 OPD 1 Jenis Layanan	60.000	6 OPD 1 Jenis Layanan	70.000	6 OPD 1 Jenis Layanan	80.000	7 OPD 1 Jenis Layanan	80.000	33 OPD 1 Jenis Layanan	80.000	80.000	Dinas Kominfo	Kota Metro



**PEMERINTAH KOTA METRO
REKAPITULASI MUTASI BARANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2020**

KODE BARANG	NAMA BARANG	SALDO 1 JAN 2020	MUTASI								SALDO 31 DES 2020
			TAMBAH				KURANG				
			Harga	Pengadaan 2020	Reclass	Mutasi Antar SKPI	Jumlah	Penghapusan	Reklas RB	Mutasi Antar SKPI	
	ASET TETAP	8.092.226.489,00	451.691.300,00	0,00	0,00	451.691.300,00	0,00	106.244.285,00	0,00	106.244.285,00	8.437.673.504,00
01	TANAH	2.436.928.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.928.400,00
02	PERALATAN MESIN	2.979.478.115,00	451.691.300,00	0,00	0,00	451.691.300,00	0,00	106.244.285,00	0,00	106.244.285,00	3.324.925.130,00
02	ALAT-ALAT BESAR	98.812.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.812.400,00
03	ALAT-ALAT ANGKUTAN	533.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.050.000,00
04	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
05	ALAT PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.436.635.425,00	240.753.500,00	0,00	0,00	240.753.500,00	0,00	24.142.855,00	0,00	24.142.855,00	1.653.246.070,00
07	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	895.480.290,00	208.263.000,00	0,00	0,00	208.263.000,00	0,00	82.101.430,00	0,00	82.101.430,00	1.021.641.860,00
08	ALAT-ALAT KEDOKTERAN, OLAAHRAGA	0,00	2.674.800,00	0,00	0,00	2.674.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.800,00
09	ALAT LABORATORIUM	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
10	ALAT-ALAT PERENJATAAN/KEAMANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GEDUNG DAN BANGUNAN	2.421.957.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.957.789,00
11	BANGUNAN GEDUNG	2.397.068.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.068.789,00
12	MONUMEN	24.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.889.000,00
04	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	248.862.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.862.185,00
13	JALAN DAN JEMBATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BANGUNAN AIR/IRIGASI	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
15	INSTALASI	26.272.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.272.900,00
16	JARINGAN	220.089.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.089.285,00
05	ASET TETAP LAINNYA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
19	HEWAN DAN TERNAK SERTA TANAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ASET RENOVASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ASET LAINNYA	9.138.000,00	0,00	106.244.285,00	0,00	106.244.285,00	9.138.000,00	0,00	0,00	9.138.000,00	106.244.285,00
01	ASET LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ASET KONDISI RUSAK BERAT	9.138.000,00	0,00	106.244.285,00	0,00	106.244.285,00	9.138.000,00	0,00	0,00	9.138.000,00	106.244.285,00
24	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	J U M L A H	8.101.364.489,00	451.691.300,00	106.244.285,00	0,00	557.935.585,00	9.138.000,00	106.244.285,00	0,00	115.382.285,00	8.543.917.789,00

Mengetahui
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Metro


Dra. FARIDA, M.Si
NIP. 19661117 199203 2 003

Metro 31 Desember 2020
Pengantar Barang,


HERWAN
Nip. 19700624 201001 1 002



KOTA METRO BUKU INVENTARIS GABUNGAN

Provinsi : PROVINSI LAMPUNG
 Kab./Kota : KOTA METRO
 Bidang : Komunikasi dan Informatika

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama/ Jenis Barang	Merk/ Type	No.Sertifikat No.Pabrik No.Chasis No.Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01.01.11.01.005	1	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	-	P.121 (dh P.14)		Hibah	2012	4900	M2	Baik	1	2.130.813.000,00	
2	01.01.11.04.001	1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	HP.01		Pembelian	2007	770	M2	Baik	1	65.205.000,00	Tanah Balai Wartawan Kota Metro
3	01.01.13.04.001	1	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	-	HP 100		Hibah	2012	460	M2	Baik	1	240.910.400,00	Tanah radio metro polis dan LVRI
4	02.02.03.04.001	1	Transportable Electric Generating Set	Krisbow / KW 261062	31517010115	BESI	Pembelian	2017			Baik	1	98.812.400,00	Teras Kantor Diskominfo
5	02.03.01.02.003	2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota / Avansa Tipe G	MHFFMRGK36K10690B52860	besi	Pembelian	2006	1300		Baik	1	105.000.000,00	Sekretariat DPRD
6	02.03.01.02.003	4	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Toyota / Innova Tipe V, Hitam	MHFXW43G464028807R-6283860	besi, baja	Pembelian	2006	2000 cc		Baik	1	194.000.000,00	BE 2151FZ
7	02.03.01.02.003	5	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Daihatsu / Terios	-	besi,	Pembelian	2015			Baik	1	188.350.000,00	
8	02.03.01.05.001	2	Sepeda Motor	Suzuki / Smash FD 110	mh8fd110c3j-18374602-id-184363	BESI BAJA, FIBER	Pembelian	2003	110		Baik	1	11.500.000,00	BE 5472 FZ dilimpahkan ke Dinas Kominfo
9	02.03.01.05.001	3	Sepeda Motor	Honda / Supra Pit	MH1HB31146OK1794BB31F-1177277	BESI BAJA, FIBER	Pembelian	2006	100		Baik	1	10.200.000,00	BE 5651 FZ dilimpahkan ke Dinas Kominfo
10	02.03.01.05.001	4	Sepeda Motor	Honda / Supra X	MH1JB51136K64088951E-1643127	BESI, BAJA, FIBER	Pembelian	2006	125		Baik	1	12.000.000,00	BE 5690 FZ dilimpahkan ke Dinas Kominfo
11	02.03.01.05.001	5	Sepeda Motor	Honda / Supra X	MH1JB51176K64092751E-1641465	BESI, BAJA, FIBER	Pembelian	2006	125		Baik	1	12.000.000,00	BE 5693 FZ dilimpahkan ke Dinas Kominfo
12	02.04.01.03.005	2	Perkakas Bengkel Lain-lain	GS Hybrid / N70	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	2	3.000.000,00	Accu INFORMATIKA
13	02.04.03.01.071	1	Global Positioning System (GPS)	Garmin sea / GPSMAP 64s	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	1	7.500.000,00	komunikasi
14	02.06.01.04.001	2	Lemari Besi	lokal	-	kayu	Pembelian	2014			Baik	1	2.951.000,00	
15	02.06.01.04.001	3	Lemari Besi	Brother / 2 pintu	-	Besi	Pembelian	2015			Baik	1	3.000.000,00	Bid. informatika
16	02.06.01.04.001	4	Lemari Besi	Brother / 2 pintu	-	Besi	Pembelian	2015			Baik	1	3.000.000,00	Subag Keu
17	02.06.01.04.001	5	Lemari Besi	-	-		Pembelian	2017			Baik	1	3.400.000,00	di ruang TU
18	02.06.01.04.001	6	Lemari Besi	-	-		Pembelian	2017			Baik	1	3.400.000,00	di ruang TU (2)
19	02.06.01.04.001	7	Lemari Besi	Fronline	F.02 04	Besi	Pembelian	2017	1mx1,8m		Baik	1	3.400.000,00	Di Ruang TU (3)

20	02.06.01.04.001	9	Lemari Besi	Frontline / 2 Pintu	-	Besi/Kaca	Pembelian	2019	Sedang		Baik	1	4.100.000,00	Warna Kuning
21	02.06.01.04.001	10	Lemari Besi	Frontline / 2 Pintu	-	Besi/Kaca	Pembelian	2019			Baik	1	3.500.000,00	Warna Kuning
22	02.06.01.04.001	11	Lemari Besi	Front Line	FCA 18	Besi	Pembelian	2020			Baik	1	3.640.000,00	
23	02.06.01.04.004	1	Filling Besi/Metal	brother	-	besi	Pembelian	2014			Baik	2	4.252.000,00	
24	02.06.01.04.004	3	Filling Besi/Metal	Brother / 4 laci	-	Besi	Pembelian	2015			Baik	3	6.000.000,00	Komunikasi
25	02.06.01.04.004	6	Filling Besi/Metal	Brother / 4 laci	-	Besi	Pembelian	2015			Baik	4	8.500.000,00	Informatika
26	02.06.01.04.004	10	Filling Besi/Metal	brother	B. 005 R4	Besi	Pembelian	2017	0,5 x 1,3 m		Baik	1	2.400.000,00	sekretariat tu
27	02.06.01.04.004	11	Filling Besi/Metal	Brother	B. 005 R4	Besi	Pembelian	2017	0,5x1,3m		Baik	1	2.400.000,00	Ruang Informatika 1
28	02.06.01.04.004	12	Filling Besi/Metal	Brother	B.005 R4	Besi	Pembelian	2017			Baik	1	2.400.000,00	Ruang Informatika 2
29	02.06.01.04.004	13	Filling Besi/Metal	Brother	B 005 R4	Besi	Pembelian	2017	0,5x1,3		Baik	1	2.400.000,00	Ruang Informatika 3
30	02.06.01.04.004	14	Filling Besi/Metal	Brother	B. 005 R4	Besi	Pembelian	2017			Baik	1	2.400.000,00	Ruang Informatika 4
31	02.06.01.04.004	15	Filling Besi/Metal	Brother / 4 Laci	-	Besi	Pembelian	2019	Sedang		Baik	1	3.500.000,00	
32	02.06.01.04.005	1	Filling Kayu	lokal	-	kayu	Pembelian	2014			Baik	2	4.500.000,00	bid informatika
33	02.06.01.04.012	1	Lemari Kaca	HPL	-	Kaca/Almuni um	Pembelian	2019			Baik	1	5.000.000,00	Warna Hitam
34	02.06.01.04.014	1	Lemari kayu	lokal	-	kayu	Pembelian	2014			Baik	1	3.000.000,00	
35	02.06.01.05.001	1	Papan Visuil	HPL / P 10	-	Fiber	Pembelian	2017	20X60cm,40X60cm		Baik	1	24.900.000,00	Kantor Wali Kota dan Aula Pemda Metro
36	02.06.01.05.005	1	Alat Penghancur Kertas	Secure Maxi	-	Fiber	Pembelian	2018	24 SC		Baik	1	3.500.000,00	Mesin Penghancur Kertas Untuk di Ruang Sekretariat Berwarna Hitam
37	02.06.01.05.006	1	Papan Nama Instansi	HPL	-	BESI	Pembelian	2017	0,5x1m		Baik	1	5.000.000,00	Halaman Kantor
38	02.06.01.05.006	2	Papan Nama Instansi	HPL	-	Fiber	Pembelian	2019			Baik	1	4.000.000,00	Ada dua unit di Gedung Dinas dan satu unit di gedung UPT Radio. Bahan Akrilik ditempel langsung di Tembok bangunan.
39	02.06.01.05.007	1	Papan Pengumuman	HPL	-	Kayu	Pembelian	2020			Baik	2	3.600.000,00	Berada di teras kantor
40	02.06.01.05.010	1	White Board	HPL	-	Triplek	Pembelian	2017	120m2		Baik	1	1.000.000,00	Ruang Sekretariat (TU)
41	02.06.01.05.017	1	Mesin Absensi	SOLUTION	X 100 C	FIBER	Pembelian	2017	X 10		Baik	1	2.500.000,00	SEKRETARIAT RUANG TU
42	02.06.01.05.040	1	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	LG / Super Narrow Bezel Video Wall	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	6	303.000.000,00	TV Wall @Rp. 49.850.000 + HDMI Cable @Rp. 1.380.000 + Brite HDMI 5 meter @Rp. 285.000
43	02.06.01.05.040	7	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Inteligente	-	Fiber/Besi	Pembelian	2019			Baik	1	6.000.000,00	Mesin Pinjer Pintu. Ada 2 unit dalam satu pengadaan. yang satu di pintu ruang komunikasi yang satu di pintu ruang sekretariat
44	02.06.02.01.004	1	Meja Kayu/Rotan	lokal	-	kayu	Pembelian	2013			Baik	1	7.400.000,00	Meja Media Center
45	02.06.02.01.005	1	Kursi Besi/Metal	PB / Berjejer	-	Besi/Stainless	Pembelian	2019			Baik	1	8.000.000,00	Kursi Tunggu. Warna Hitam dan Silver
46	02.06.02.01.007	1	Zice	lokal	-	kayu	Pembelian	2006			Baik	1	750.000,00	
47	02.06.02.01.010	1	Meja Rapat	Hand made	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	1	6.900.000,00	Bid.Informatika
48	02.06.02.01.028	1	Kursi Tamu	lokal	-	kayu	Pembelian	2014			Baik	2	14.468.000,00	
49	02.06.02.01.028	3	Kursi Tamu	Hand made	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	1	6.900.000,00	Bid.Informatika
50	02.06.02.01.028	5	Kursi Tamu	HPL	-	Kayu	Pembelian	2019			Baik	1	5.000.000,00	Warna Coklat
51	02.06.02.01.030	4	Kursi Putar	Rakuda	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	1	1.200.000,00	Kursi putar KECIL Bid.informatika
52	02.06.02.01.030	5	Kursi Putar	Butterfly	-	Busa/Fiber	Pembelian	2018	1 Biro		Baik	3	9.000.000,00	Kursi putar 1 Biro di ruang Komunikasi
53	02.06.02.01.030	8	Kursi Putar	Manufacture Gresco	-	Busa/Fiber	Pembelian	2018	1 Biro		Baik	1	3.450.000,00	Kursi Putar 1 Biro di ruang Komunikasi
54	02.06.02.01.034	1	Kursi Lipat	Chitose / Lipat	-	Busa/Besi	Pembelian	2019	Kecil		Baik	5	3.702.000,00	
55	02.06.02.01.048	1	Meja Biro	lokal	-	kayu	Pembelian	2013	1 biro		Baik	6	6.444.000,00	

56	02.06.02.01.048	7	Meja Biro	Hand Made / 1/2 Biro	-	Kayu	Pembelian	2015			Baik	2	3.600.000,00	Informatika 1/2 biro
57	02.06.02.01.048	9	Meja Biro	Hand Made / 1 Biro	-	Kayu	Pembelian	2015			Baik	1	2.550.000,00	Informatika R kabit 1 biro
58	02.06.02.01.048	10	Meja Biro	hand made / 1 biro	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	2	7.000.000,00	Informatika
59	02.06.02.01.048	12	Meja Biro	hand made / 1/2 biro	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	4	6.000.000,00	1/2 biro bid.komunikasi
60	02.06.02.01.048	16	Meja Biro	Hand made	-	Kayu	Pembelian	2016			Baik	12	15.000.000,00	Bid.Informatika
61	02.06.02.01.048	28	Meja Biro	Hand Made	-	Kayu	Pembelian	2017	70x50x120cm		Baik	1	1.600.000,00	Sekretariat Ruang TU 1
62	02.06.02.01.048	29	Meja Biro	HAND MADE	-	KAYU	Pembelian	2017	70X50X150cm		Baik	1	1.600.000,00	Sekretariat Ruang TU 2
63	02.06.02.01.048	30	Meja Biro	HAND MADE	-	KAYU	Pembelian	2017			Baik	1	1.600.000,00	Sekretariat Ruang TU 3
64	02.06.02.01.048	31	Meja Biro	HAND MADE	-	KAYU	Pembelian	2017	70X50X120cm		Baik	1	1.600.000,00	Sekretariat Ruang TU 4
65	02.06.02.01.048	32	Meja Biro	HAND MADE	-	KAYU	Pembelian	2017	70X50X120		Baik	1	1.600.000,00	Sekretariat Ruang TU 5
66	02.06.02.01.066	1	Kursi Kerja	KD 1001 / Putar	-	Busa/Fiber	Pembelian	2019	1 Biro		Baik	3	9.000.000,00	Digunakan Oleh Kabid dan Kasi di bidang informatika
67	02.06.02.01.066	4	Kursi Kerja	Front Line	MI 08 CATL	Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	2.874.800,00	
68	02.06.02.01.073	1	Karpet	Ambal Kasmir/Karpet	-	Kain	Pembelian	2020			Baik	1	1.980.000,00	Panjang 3 Meter
69	02.06.02.03.001	1	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	Philips / Up to 800	-	Besi+Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	7.500.000,00	Di Ruang Sekretariat
70	02.06.02.04.001	1	Lemari Es	AQUA / AQUA	83151258	FIBER	Pembelian	2017	AQR0260 S		Baik	1	5.000.000,00	SEKRETARIAT RUANG TU
71	02.06.02.04.003	2	AC Unit	Panasonic	-	besi	Pembelian	2014	1/2 PK		Baik	1	5.000.000,00	
72	02.06.02.04.003	4	AC Unit	Panasonic / 1 PK	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	1	4.800.000,00	Informatika
73	02.06.02.04.003	5	AC Unit	Panasonic / CU 9 RKJ	-	besi	Pembelian	2016	1 PK		Baik	1	4.900.000,00	Bid.Informatika
74	02.06.02.04.003	6	AC Unit	Panasonic	-	Fiber	Pembelian	2016	1 PK		Baik	1	5.000.000,00	Bid. LL
75	02.06.02.04.003	7	AC Unit	Panasonic	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	1	5.000.000,00	Bid. Informatika
76	02.06.02.04.003	10	AC Unit	Panasonic	U V9 SKP (R404)	Fiber	Pembelian	2017	1 PK		Baik	1	5.000.000,00	Bidang Informatika
77	02.06.02.04.003	11	AC Unit	Panasonic / Inverter	-	Fiber	Pembelian	2019	1,5 PK		Baik	2	12.000.000,00	
78	02.06.02.04.003	13	AC Unit	Panasonic / Inverter	-	Fiber	Pembelian	2019	1 PK		Baik	1	5.000.000,00	
79	02.06.02.04.003	14	AC Unit	Panasonic	CS-YN9TKJ	Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	6.000.000,00	
80	02.06.02.04.003	15	AC Unit	Cawang	EU-SN-9SGM	Fiber	Pembelian	2020			Baik	2	10.754.800,00	
81	02.06.02.04.003	17	AC Unit	Sharp / 50HZ 220V	-	Besi/Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	4.791.300,00	Di Ruang Siaran Radio Metropolitan
82	02.06.02.05.009	1	Tabung Gas	Pyramid	3702210116	Besi	Pembelian	2017	6 Kg		Baik	1	1.500.000,00	Sekretariat Ruang TU
83	02.06.02.05.015	1	Dispenser	UTOPIA SANKEN	3.25961 E + 11	Fiber	Pembelian	2017			Baik	1	2.800.000,00	Sekretariat (R.TU)
84	02.06.02.05.015	2	Dispenser	Miyako	-	Fiber	Pembelian	2019			Baik	1	657.000,00	
85	02.06.02.06.002	1	Radio	polytron	-	besi, fiber	Pembelian	2010			Baik	1	1.000.000,00	
86	02.06.02.06.003	1	Televisi	Samsung / LED	-	besi	Pembelian	2014	32"		Baik	1	5.000.000,00	
87	02.06.02.06.003	2	Televisi	Samsung / LED 32"	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	1	4.500.000,00	Komunikasi
88	02.06.02.06.003	3	Televisi	Samsung	F114003 LD 02	Fiber	Pembelian	2017	32"		Baik	1	4.000.000,00	Sekretairat (R.Kadis)
89	02.06.02.06.008	1	Sound System	Saporo / Wireless	-	Besi / Fiber	Pembelian	2019			Baik	1	9.000.000,00	Warna Hitam.
90	02.06.02.06.018	1	Unit Power Supply	Inverter Suoer / 1500 Watt	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	2	10.000.000,00	informatika
91	02.06.02.06.032	1	Tiang Bendera	HPL	-	BESI	Pembelian	2017	5m		Baik	1	2.000.000,00	Halaman Kantor
92	02.06.02.06.037	1	Tangga Aluminium	Molar / EN 131 GE	-	Aluminium	Pembelian	2018	4 Meter		Baik	1	3.500.000,00	Tangga Aluminium untuk Ruang Informatika

93	02.06.02.06.049	1	Handy Cam	Sony / DVD 710 E	-	fiber	Pembelian	2008			Baik	1	8.500.000,00	
94	02.06.02.06.049	2	Handy Cam	sony	-	fiber	Pembelian	2013			Baik	1	18.900.000,00	
95	02.06.02.06.049	3	Handy Cam	SONY / PJ410	-	fiber	Pembelian	2015			Baik	1	7.150.000,00	informatika
96	02.06.02.06.050	1	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Dekson	-	Besi	Pembelian	2019			Baik	1	1.000.000,00	Door Closer. Ada 2 unit dalam 1 pengadaan. Yang satu di pintu ruang sekretariat, yang satu di pintu ruang komunikasi
97	02.06.03.02.001	1	P.C Unit/ Komputer PC	Dual core	-	besi	Pembelian	2013			Baik	1	8.000.000,00	
98	02.06.03.02.001	3	P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo / Edge E145-51A	-	besi	Pembelian	2014			Baik	1	6.000.000,00	
99	02.06.03.02.001	4	P.C Unit/ Komputer PC	Asus / E-Top	-	besi	Pembelian	2014			Baik	1	8.500.000,00	
100	02.06.03.02.001	5	P.C Unit/ Komputer PC	SUOER / 1500 W	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	1	5.900.000,00	INVERTER Bid.Informatika
101	02.06.03.02.001	6	P.C Unit/ Komputer PC	HP Pavillion / 20-r0231 all in one	-	besi	Pembelian	2016			Baik	6	59.400.000,00	Bid.Informatika
102	02.06.03.02.001	12	P.C Unit/ Komputer PC	SOUER / 1500 W	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	1	5.900.000,00	INVERTER Bid.Informatika
103	02.06.03.02.001	13	P.C Unit/ Komputer PC	ASUS / ASUS	V 22014	fiber	Pembelian	2017	Va 14		Baik	1	9.900.000,00	SEKRETARIAT RUANG TU 1
104	02.06.03.02.001	14	P.C Unit/ Komputer PC	ASUS	V 22014	Fiber	Pembelian	2017	Va 14		Baik	1	9.900.000,00	Sekretariat Ruang TU 2
105	02.06.03.02.001	15	P.C Unit/ Komputer PC	ASUS	V 22014	Fiber	Pembelian	2017	Va 14		Baik	1	9.900.000,00	Sekretariat Ruang TU 3
106	02.06.03.02.001	16	P.C Unit/ Komputer PC	ACER	50-60 HZ	FIBER	Pembelian	2017	19,5"		Baik	1	9.200.000,00	BIDANG KOMUNIKASI
107	02.06.03.02.001	17	P.C Unit/ Komputer PC	Samsung / Intel Core i 5	-	Fiber	Pembelian	2017	SF 350		Baik	1	9.000.000,00	
108	02.06.03.02.001	18	P.C Unit/ Komputer PC	LG	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	9.000.000,00	Komputer PC untuk Ruangan Sekretariat
109	02.06.03.02.001	19	P.C Unit/ Komputer PC	HP / All In One Pavilion 20 C 301	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	9.000.000,00	Komputer PC untuk Ruangan Komunikasi
110	02.06.03.02.001	20	P.C Unit/ Komputer PC	Asus / Vivo AIO V222 UA	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	10.000.000,00	Komputer PC Unit di ruang Komunikasi
111	02.06.03.02.001	21	P.C Unit/ Komputer PC	Asus / 5340 MC 8100	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	11.975.000,00	Komputer PC di ruang Radio
112	02.06.03.02.001	22	P.C Unit/ Komputer PC	Asus / Vivo AIO V241 IC	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	3	44.925.000,00	Komputer PC di Ruangan Bidang Informatika
113	02.06.03.02.001	25	P.C Unit/ Komputer PC	Acer / AIO Aspire AC 22-860	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	2	22.700.000,00	Komputer PC. 1 Unit di Radio Metropolitan 1 Unit di Komunikasi
114	02.06.03.02.001	27	P.C Unit/ Komputer PC	HP / All In One PC 22-B4 20L	-	Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	7.500.000,00	
115	02.06.03.02.001	28	P.C Unit/ Komputer PC	LG / Core i5	-	Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	7.500.000,00	Ruang Siaran Radio Metropolitan
116	02.06.03.02.001	29	P.C Unit/ Komputer PC	Samsung	-	Core i5	Pembelian	2020			Baik	1	7.500.000,00	Ruang Komunikasi
117	02.06.03.02.001	30	P.C Unit/ Komputer PC	Lenovo	-	Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	14.960.000,00	Diruang Infor
118	02.06.03.02.002	1	Lap Top	Asus / Transformers	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	1	8.000.000,00	informatika
119	02.06.03.02.002	2	Lap Top	Asus / A455L	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	1	9.000.000,00	informatika
120	02.06.03.02.002	4	Lap Top	Asus	TM 15 - 7200 U	FIBER	Pembelian	2017	2,5 X		Baik	1	9.600.000,00	Sekretariat Ruang TU
121	02.06.03.02.002	5	Lap Top	ASUS	TM 15 - 7200 U	FIBER	Pembelian	2017	2,5 X		Baik	1	9.600.000,00	Bidang Informatika
122	02.06.03.02.002	6	Lap Top	Asus / A442U	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	12.990.000,00	laptop peruntukan bidang Komunikasi
123	02.06.03.02.002	7	Lap Top	ASUS / Intelcore i3	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	9.500.000,00	Laptop Bidang sekretariat Ruang TU warna Putih
124	02.06.03.02.002	8	Lap Top	Toshiba / Core i7, 4700 MQ	-	Fiber	Pembelian	2019	12 inchi		Baik	1	14.980.000,00	Spesifikasi : Processor Intel Core i7, 2,4 GHz, up to 3,4 GHz. Ram 8 GB, HDD 1 TB, Windows 8. Warna Hitam

125	02.06.03.02.003	1	Note Book	Asus / X-451	-	fiber	Pembelian	2014			Baik	2	12.000.000,00	
126	02.06.03.02.003	3	Note Book	Apple / I Pad Pro	-	Fiber	Pembelian	2018	10 inchi / 256 GB		Baik	1	14.900.000,00	Smart Phone I Pad (I Phone) di ruang Kepala Dinas
127	02.06.03.04.008	1	Printer	Epson / L-210	-	fiber	Pembelian	2014			Baik	1	3.500.000,00	
128	02.06.03.04.008	2	Printer	Epson / Injek L 310	-	fiber	Pembelian	2016			Baik	1	2.950.000,00	Bid.Informatika
129	02.06.03.04.008	3	Printer	Epson / LX 310	-	fiber	Pembelian	2016			Baik	1	2.950.000,00	Bid.Informatika
130	02.06.03.04.008	4	Printer	Canon / iP 2770	-	fiber	Pembelian	2016			Baik	1	1.000.000,00	Bid.Informatika
131	02.06.03.04.008	5	Printer	EPSON L 310	5615019	FIBER	Pembelian	2017	33 PPM		Baik	1	3.000.000,00	Sekretariat Ruang TU 1
132	02.06.03.04.008	6	Printer	EPSON L 310	5615019	FIBER	Pembelian	2017	33 PPM		Baik	1	3.000.000,00	Sekretariat Ruang TU 2
133	02.06.03.04.008	7	Printer	EPSON L 360	5615019	FIBER	Pembelian	2017	33 PPM		Baik	1	3.000.000,00	Sekretariat Ruang TU 3
134	02.06.03.04.008	8	Printer	LASER JET PRO / MPFM 130 a	717589	FIBER	Pembelian	2017	22 ppm		Baik	1	3.500.000,00	BIDANG KOMUNIKASI
135	02.06.03.04.008	9	Printer	Hp Laser Jet Pro / Cp 1025	4112	Fiber	Pembelian	2017	16 ppm		Baik	1	5.000.000,00	Bidang Komunikasi
136	02.06.03.04.008	10	Printer	epson / L-385	-	fiber	Pembelian	2017			Baik	1	4.100.000,00	
137	02.06.03.04.008	11	Printer	Epson / L310	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	3.000.000,00	Printer Peruntukan Bidang Sekretariat ruang TU
138	02.06.03.04.008	12	Printer	Epson / L310	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	3.000.000,00	Printer di ruangan Sekretariat
139	02.06.03.04.008	13	Printer	Canon / Pixma IP2770	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	1.100.000,00	Printer di Bidang Komunikasi
140	02.06.03.04.008	14	Printer	Epson / L3150	-	Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	3.500.000,00	Radio Metropolis
141	02.06.03.05.002	1	Monitor	LG / LED	-	fiber	Pembelian	2014	19"		Baik	2	2.600.000,00	
142	02.06.03.05.003	2	Printer	Canon / IP 2770	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	2	2.600.000,00	informatika
143	02.06.03.05.003	4	Printer	Epson / L210	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	1	3.000.000,00	komunikasi
144	02.06.03.05.003	1	Printer	EPSON / L220	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	1	2.500.000,00	Metropolis
145	02.06.03.05.011	1	UPS	stavolt	-	besi	Pembelian	2013			Baik	1	9.240.000,00	
146	02.06.03.05.011	2	UPS	Intelligents / SP 1000	-	besi	Pembelian	2014			Baik	1	5.000.000,00	
147	02.06.03.05.011	3	UPS	ICA / 1022 B-2000 VA	-	Besi/Fiber	Pembelian	2019	Sedang		Baik	1	6.000.000,00	Barang terdapat di Kantor Pemda (Ruang LPSE)
148	02.06.03.05.011	4	UPS	ICA / LED & BUZZER	-	Besi	Pembelian	2020			Baik	2	69.960.000,00	Di Bidang Informatika 1 dan di Command Centre 1
149	02.06.03.05.014	1	Harddisk Eksternal	Seagate / Expansion	-	besi	Pembelian	2016	1 TB		RB	1	1.400.000,00	Bid.Komunikasi
150	02.06.03.05.014	3	Harddisk Eksternal	THOSIBA	1541698	FIBER	Pembelian	2017	2,5"		RB	1	1.500.000,00	Bidang Komunikasi
151	02.06.03.05.014	4	Harddisk Eksternal	Thosiba	-	Fiber	Pembelian	2018	2TB 2,5"		Baik	1	2.000.000,00	Hardisk Bidang Komunikasi
152	02.06.03.05.014	5	Harddisk Eksternal	My Book	-	Fiber	Pembelian	2018	8TB Box 3,5"		Baik	1	5.000.000,00	Hardisk Bidang Komunikasi
153	02.06.03.05.018	1	Speaker Aktive Komputer	Simbada / CST 3000N	-	Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	508.600,00	Speaker Aktif Komputer
154	02.06.03.06.001	1	Server	IBM X3630	-	besi	Pembelian	2013			Baik	1	44.660.000,00	
155	02.06.03.06.001	2	Server	RAINER SMR / 2C 16-2.1.SATA 3S	C26R 010052	FIBER	Pembelian	2017			Baik	1	99.800.000,00	Bidang Informatika
156	02.06.03.06.001	3	Server	Hik Vision / HDMI	-	Besi	Pembelian	2020			Baik	1	34.639.000,00	
157	02.06.03.06.002	6	Router	Mikrotik / NAND	-	Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	5.545.000,00	Di Bidang Informatika
158	02.06.03.06.004	3	Modem	Huaweu	-	fiber	Pembelian	2010			Baik	1	1.500.000,00	

159	02.06.03.06.006	3	Peralatan Jaringan Lain-lain	BTECH / BT-8312	-	Besi	Pembelian	2018			Baik	6	43.500.000,00	Bracket/Tiang TV Wall berada di gedung Bappeda Pengadaan Informatika
160	02.06.03.06.006	9	Peralatan Jaringan Lain-lain	Router Firewall / Mikrotik Routerboard	-	Fiber	Pembelian	2018	RB1100Dx41U		Baik	1	6.500.000,00	Bidang Informatika
161	02.06.03.06.006	10	Peralatan Jaringan Lain-lain	Router Indoor / Mikrotik Routerboard	-	Fiber	Pembelian	2018	RB3011UiAS		Baik	1	3.700.000,00	Bidang Informatika
162	02.06.03.06.006	11	Peralatan Jaringan Lain-lain	WIRELESS ROUTER / ASUS RT	-	Fiber	Pembelian	2018	N14UHP		Baik	1	1.500.000,00	Bidang Informatika
163	02.06.03.06.006	12	Peralatan Jaringan Lain-lain	WIRELESS ROUTER / ASUS RTN14 UHP	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	25	37.500.000,00	Bidang Informatika
164	02.06.03.06.006	36	Peralatan Jaringan Lain-lain	WIRELESS ROUTER / ASUS RT	-	Fiber	Pembelian	2018	N18U		Baik	10	18.000.000,00	Bidang Informatika
165	02.06.03.06.006	39	Peralatan Jaringan Lain-lain	Radio Access Point/Antena / TP Link	-	Fiber	Pembelian	2018	TL WR7210G		Baik	10	13.000.000,00	Bidang Informatika
166	02.06.03.06.006	57	Peralatan Jaringan Lain-lain	Hpl / Panjang 7 meter	-	Besi Baja	Pembelian	2020			Baik	17	28.050.000,00	Terpasang di beberapa titik
167	02.06.03.06.008	1	Radio Access Point	lokal	-	besi	Pembelian	2014			Baik	4	8.580.000,00	
168	02.06.03.06.009	1	Antene	lokal	-	besi	Pembelian	2014			Baik	3	5.940.000,00	
169	02.06.03.06.010	3	Switch Hub	TP Link / TlSG1016	-		Pembelian	2015			Baik	1	2.064.285,00	TP Link informatika
170	02.06.03.06.010	4	Switch Hub	TP Link / TlSG1016	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	1	2.064.285,00	TP Link informatika
171	02.06.03.06.010	5	Switch Hub	D Link / DGS 101 6D - 16 Port	-	fiber	Pembelian	2016			Baik	3	6.000.000,00	16 port
172	02.06.03.06.010	11	Switch Hub	D Link / DGS-11-24P	-	Besi/Fiber	Pembelian	2019			Baik	2	9.500.000,00	Pengadaan dilakukan oleh bidang informatika
173	02.07.01.01.039	4	Headphone	Behringer	-	Fiber	Pembelian	2017	HPX4000		Baik	2	2.000.000,00	
174	02.07.01.01.039	6	Headphone	AKG dan Behringer	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	4	4.000.000,00	3 Buah Headphone AKG dan 1 Buah Headphone Behringern di Radio Metropolis
175	02.07.01.01.040	1	Microphone/Wireless Mic	Sennheiser	-	Besi	Pembelian	2018			Baik	2	1.600.000,00	Microphone untuk siaran di Radio Metropolis
176	02.07.01.01.046	1	Audio Master Control Unit	MPM 24 Channel	-	Besi+Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	9.900.000,00	Di ruang Siaran
177	02.07.01.01.083	1	Handycam	Sony / HDR PJ 50	-		Pembelian	2011			Baik	1	14.900.000,00	
178	02.07.01.01.088	1	LCD Proyektor	Acer / X1173G	-	fiber	Pembelian	2014			Baik	1	4.961.000,00	
179	02.07.01.01.088	2	LCD Proyektor	focus / 1N220	-	fiber	Pembelian	2014			Baik	1	5.000.000,00	
180	02.07.01.01.089	1	CCTV	DVR / AHDVR 1104-A Dome	-	fiber	Pembelian	2015			Baik	1	5.000.000,00	informatika
181	02.07.01.01.089	2	CCTV	HK Vision / Turbo HD	-	Fiber/Besi	Pembelian	2019			Baik	1	10.000.000,00	Server ada di Ruang Kepala Dinas, kamera ada 8 unit. Tersebar di 8 titik.
182	02.07.01.01.089	3	CCTV	Hik Vision/Speed Dome / 12 VDC	-	Fiber	Pembelian	2020			Baik	17	170.442.000,00	Terpasang di beberapa titik
183	02.07.01.01.089	20	CCTV	HIK Vision / 12 VDC	-	Fiber	Pembelian	2020			Baik	3	25.421.000,00	
184	02.07.01.01.091	1	Drone	Mavic PRo	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	29.990.000,00	Drone Bid.Informatika
185	02.07.01.02.002	1	Off Air TV Monitor	DJI / Phantom 4	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	1	27.500.000,00	Drone Bid.Informatika

186	02.07.01.02.003	1	Camera Electronic	nixon	-	fiber	Pembelian	2013			Baik	1	14.950.000,00	
187	02.07.01.02.003	2	Camera Electronic	Canon / 60 D	-	fiber	Pembelian	2014			Baik	1	14.950.000,00	
188	02.07.01.02.003	3	Camera Electronic	NIKON / Coolpix L340	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	1	3.000.000,00	Informatika
189	02.07.01.02.003	4	Camera Electronic	Canon / Power shoot sx400is	-	fiber	Pembelian	2015			Baik	1	3.000.000,00	informatika
190	02.07.01.02.003	5	Camera Electronic	Nikon / D 7200	-	fiber	Pembelian	2016			Baik	1	19.900.000,00	Bid.informatika
191	02.07.01.02.003	6	Camera Electronic	Panasonic / Lumix Gh5	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	32.450.000,00	Kamera Miroles dengan Lensa G Vario 14-45mm Bid. Informatika
192	02.07.01.02.003	7	Camera Electronic	Nikon D500 / Digital SLR	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	32.450.000,00	Kamera Digital SLR Bid.Informatika
193	02.07.01.02.013	1	Video Monitor	E-Link / Video Wall Controller D Series 6 Input	-	Fiber	Pembelian	2018	12 Output		Baik	1	156.500.000,00	Video Controller untuk TV Monitor peruntukan di gedung Bappeda
194	02.07.01.02.044	1	Stabilizing Amplifier	Royal	-	besi	Pembelian	2014			Baik	1	14.800.000,00	MP
195	02.07.01.02.062	1	Camera Film	Logitech	-	Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	5.000.000,00	Radio Metropolis
196	02.07.01.02.062	2	Camera Film	Logitech / Brio 4K Pro Web Cam	-	Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	5.000.000,00	
197	02.07.01.02.063	1	Lensa Kamera	Canon / EOS 60D	-	fiber	Pembelian	2016	18-55 mm		Baik	1	3.000.000,00	Bid.Komunikasi
198	02.07.01.02.063	2	Lensa Kamera	Nikkon Nikkor / F/3,5 6 G ED DX VR	-	Fiber	Pembelian	2018	AF-S 18 - 200mm		Baik	1	13.000.000,00	Lensa Kamera Bid Informatika
199	02.07.01.02.100	1	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	Speedlight Nikon / SB - 500	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	6.000.000,00	Flash Kamera Bid.Informatika
200	02.07.01.02.101	1	Batterai Camera (Li-Ion/Polymer)	Nikon / en el 15 dan Panasonic DMW BLF 19	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	3.300.000,00	Baterai Kamera Bid.Informatika
201	02.07.01.02.101	2	Batterai Camera (Li-Ion/Polymer)	Sony / FP - FV 70	-		Pembelian	2018			Baik	1	1.000.000,00	Baterai Handycam Bid.Informatika
202	02.07.01.02.101	3	Batterai Camera (Li-Ion/Polymer)	DJI / CE	-	Aluminium+Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	2.500.000,00	Baterai Drone
203	02.07.02.01.004	1	Amplifier	TOA / Bulat Corong	-	Fiber	Pembelian	2019			Baik	1	3.000.000,00	Warna Putih. TOA Bulat Corong.
204	02.07.02.01.005	1	Microphone	Beyermic	-	Besi+Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	950.000,00	Radio Metropolis
205	02.07.02.01.008	1	Sound System	HQ (Hardquest)	-	Fiber/Besi	Pembelian	2018			Baik	1	9.400.000,00	Standing Speaker (Sound System/Salon). Speaker Berdiri beserta Tripod (Kaki nya) diruang Sekretariat
206	02.07.02.01.008	2	Sound System	Ashley	-	Fiber	Pembelian	2020			Baik	1	9.000.000,00	Radio Metropolis
207	02.07.02.01.014	1	Handy Talky	Icom / IC-V88	-		Pembelian	2015			Baik	1	2.200.000,00	informatika
208	02.07.02.01.014	2	Handy Talky	Icom / IC- V88	-	fiber	Pembelian	2015			Baik	1	2.200.000,00	informatika
209	02.07.02.01.014	3	Handy Talky	Icom / IC - V88	-	fiber	Pembelian	2015			Baik	1	2.200.000,00	informatika
210	02.07.02.01.014	4	Handy Talky	I COM / IC V80	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	3	6.000.000,00	Bid. Komunikasi
211	02.07.02.01.014	7	Handy Talky	Alinco / DJ-W10	-	Fiber	Pembelian	2019			Baik	2	4.000.000,00	
212	02.07.02.01.020	1	Facsimile	PANASONIC 987 KX	-	FIBER	Pembelian	2017	FT 987 X		Baik	1	3.000.000,00	Sekretariat Ruang TU
213	02.07.02.01.021	1	Handphone	Asus / Zenfone Max	-	fiber	Pembelian	2016			Baik	3	9.900.000,00	Bid.informatika
214	02.07.02.01.021	4	Handphone	Asus / Zenpone Max	-	fiber	Pembelian	2016			Baik	3	9.000.000,00	Bid.informatika

215	02.07.02.01.021	8	Handphone	Xiaomi	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	2	7.000.000,00	Bid.Sekretariat Ruang TU 2
216	02.07.02.01.021	10	Handphone	Samsung	-	Fiber	Pembelian	2018			Baik	1	13.990.000,00	Dipegang oleh Kepala Dinas
217	02.07.02.03.005	3	Alat komunikasi Radio HF/FM Lain-lain	EIMAC / C1500x	-	Tembaga	Pembelian	2016			Baik	1	29.900.000,00	Tabung pemancar
218	02.07.02.05.004	1	Alat komunikasi Radio UHF Lain-lain	HPL	-	Almunium	Pembelian	2018			Baik	1	4.000.000,00	Tiang Antena Pemancar Mini di Radio Metropolis
219	02.07.03.03.004	2	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	custom / geser	-	tembaga	Pembelian	2015			Baik	1	1.500.000,00	Potensio geser
220	02.07.03.03.004	3	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	100pf / 5000v	-	keramik	Pembelian	2015			Baik	2	2.400.000,00	Kapasitor pemancar
221	02.07.03.03.004	5	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	RVR / TEX30 LCD	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	1	19.900.000,00	Exciter Pemancar radio
222	02.07.03.20.001	1	Self Supporting Tower	Hand made / Tri Angel	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	1	20.934.000,00	Tower Triangel Kecamatan Metro Utara
223	02.07.03.20.001	2	Self Supporting Tower	Hand made / Tri Angel	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	1	20.934.000,00	Tower Triangel Kecamatan Metro Pusat
224	02.07.03.20.001	3	Self Supporting Tower	Hand made / Tri Angel	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	1	20.934.000,00	Tower Triangel Kecamatan Metro selatan
225	02.07.03.20.001	4	Self Supporting Tower	Hand made / Tri Angel	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	1	20.934.000,00	Tower Triangel Kecamatan Metro timur
226	02.07.03.20.001	5	Self Supporting Tower	Hand made / Tri Angel	-	Besi	Pembelian	2016			Baik	1	20.934.000,00	Tower Triangel Kecamatan Metro Barat
227	02.07.03.23.009	1	Compresor Amplifier	DBX / drive rack 260	-	besi	Pembelian	2014			Baik	1	8.000.000,00	MP
228	02.07.03.23.012	1	Audio Processor	Behringer / QX 2222	-		Pembelian	2014			Baik	1	7.000.000,00	MP
229	02.07.03.26.001	13	Antena WLAN	Ubiquity Airmax & Sector	-	besi	Pembelian	2013			Baik	3	19.470.000,00	
230	02.07.03.26.001	30	Antena WLAN	Ubiquity	-	besi	Pembelian	2013			Baik	3	8.415.000,00	
231	02.07.03.26.001	72	Antena WLAN	Ubiquity Airmax & Airdish	-	besi	Pembelian	2013			Baik	1	6.050.000,00	
232	02.07.03.26.001	75	Antena WLAN	Power Beam M5	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	1	2.764.286,00	Ubiquiti power beam M5 informatika
233	02.07.03.26.001	76	Antena WLAN	Ubiquiti power beam M5	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	2	5.528.572,00	informatika
234	02.07.03.26.001	78	Antena WLAN	Ubiquiti power beam M5	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	4	11.057.144,00	Ubiquiti power beam M5 informatika
235	02.07.03.26.001	85	Antena WLAN	Ubiquiti power beam M5	-	fiber	Pembelian	2015			Baik	2	5.528.572,00	Ubiquiti power beam M5
236	02.07.03.26.001	87	Antena WLAN	Ubiquiti Roket Airmax M5	-	Fiber	Pembelian	2015			Baik	1	2.364.286,00	Ubiquiti Roket Airmax M5 informatika
237	02.07.03.26.001	88	Antena WLAN	Ubiquiti / Pico station M2HP	-	fiber	Pembelian	2016			Baik	2	3.700.000,00	Router Wifi Outdoor PICO
238	02.07.03.26.001	90	Antena WLAN	Ubiquiti / PICO	-	fiber	Pembelian	2016			Baik	3	6.090.000,00	Pico Informatika
239	02.07.03.26.001	93	Antena WLAN	Ubiquiti / Power Beam M5	-	Fiber	Pembelian	2016			Baik	15	33.000.000,00	PB M5 informatika
240	02.07.03.26.001	110	Antena WLAN	Ubiquiti / powerbeam M5	-	fiber	Pembelian	2016			Baik	18	36.900.000,00	antena penerima PB M5
241	02.08.02.06.004	1	Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain	HPL	-	Kayu	Pembelian	2020			Baik	1	2.674.800,00	
242	02.09.06.04.018	1	Optical Clinometer	SUUNTO / PM 5/360 PC	-	Almunium	Pembelian	2015			Baik	1	5.000.000,00	komunikasi
243	03.11.01.01.001	4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-		Hibah	2001	54	M2	Baik	1	24.899.400,00	Eks Lamteng, Bangunan Pepabri (LVRI)
244	03.11.01.01.001	5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Hibah	2001	86	M2	Baik	1	119.454.600,00	Eks Lamteng, Bangunan Rapemda
245	03.11.01.01.001	9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Hibah	2004	88.8	M2	Baik	1	651.630.506,00	Bangunan TPKB rangka (Komunikasi sekarang)
246	03.11.01.01.001	6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Hibah	2007	240	M2	Baik	1	158.900.000,00	Bangunan Kantor PWI/Balai Wartawan

247	03.11.01.01.001	7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-		Beton	Pembelian	2008	432	M2	Baik	1	19.945.000,00	Rehab Balai Wartawan
248	03.11.01.01.001	8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	02.175-PL/SPK/PGRP-CK/D.1/2014	Beton	Pembelian	2014	56	M2	Baik	1	260.629.055,00	Rehabilitasi Ex Mess PU Pengairan
249	03.11.01.01.001	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2017		M2	Baik	1	132.263.942,00	Ruang Kabis Informatika dan Ruang MCC baru
250	03.11.01.02.001	1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	-	-	Beton	Hibah	2002	33.95	M2	Baik	1	40.200.000,00	DAU. Gd.Parkir lama
251	03.11.01.09.001	4	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2001	244.5	M2	Baik	1	409.654.550,00	Gedung Balai Wartawan
252	03.11.01.09.001	3	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2007	72	M2	Baik	1	74.850.000,00	APBD Rehab Balai Wartawan Kota Metro
253	03.11.01.21.002	1	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Semi Per	-	-	Beton	Pembelian	2008	40.7	M2	Baik	1	21.765.000,00	Gd. UPT Parkir lama/dempet R.bakso
254	03.11.01.27.005	1	Konstruksi Pagar	-	-		Pembelian	2009	184.4	M2	Baik	1	95.202.344,00	PEMBANGUNAN PAGAR BALAI WARTAWAN
255	03.11.01.27.016	1	Bangunan Lain-Lain	-	445/SPK/Kom/D-13/02/2018		Pembelian	2018		M2	Baik	1	38.375.000,00	Baliho di Jl. Diponegoro (depan Kantor BPPRD) ukuran 3x4 m2 berbahan besi Hollow Galvanis 4/4
256	03.11.01.27.016	2	Bangunan Lain-Lain	-	761/SPK/KOM/D-13/01/2018		Pembelian	2018		M2	Baik	1	46.950.000,00	Baliho di Jalur Dua Jl. Sudirman di dekat Pos Polisi Perbatasan Metro dan Lampung Tengah. Bahan Pipa Besi 10" dan 12" Jenis Hollow. Ukuran baliho 4x4 m2
257	03.11.01.27.016	3	Bangunan Lain-Lain	-	385/SPK/D-13/2018	Beton	Pembelian	2018	6	M2	Baik	1	17.959.052,00	Gerbang Gapura Kantor Infokom
258	03.11.02.04.001	1	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	-	SK WK No : 477/KPTS/LTD-5/2012	Beton	Hibah	2012	65	M2	Baik	1	230.346.240,00	Mess Pengairan I (Mess Bagian Umum); dicatat berdasarkan SK WK No : 477/KPTS/LTD-5/2012
259	03.11.02.04.004	1	Asrama Lain-lain	-	-	Beton	Pembelian	2005	22	M2	Baik	1	54.044.100,00	PEMBANGUNAN GEDUNG/ MESS
260	03.12.07.02.005	1	Rambu Tidak Bersuar Lain-lain	-	-		Pembelian	2014	0	M2	Baik	1	24.889.000,00	Tangga tower Metropolis
261	04.14.04.04.002	1	Saluran Drainase	-	-		Pembelian	2015	0	M2	Baik	1	2.500.000,00	Saluran Drainase Metropolis
262	04.15.10.02.001	1	Instalasi Kabel Listrik	-	-	10600 VA	Pembelian	2016	0	M2	Baik	1	6.400.000,00	Penambahan Daya listrik di B. Komunikasi dan Informatika
263	04.15.10.02.001	2	Instalasi Kabel Listrik	-	BKU 49/50		Pembelian	2017		M2	Baik	1	19.872.900,00	Penambahan Daya
264	04.16.05.01.001	1	Jaringan CCTV	-	-		Pembelian	2017		M2	Baik	1	99.800.000,00	12 Unit Telah Terpasang di beberapa titik
265	04.16.05.01.002	2	Jaringan WIFI	-	-		Pembelian	2010		M2	Baik	1	8.475.000,00	TP Link
266	04.16.05.01.002	3	Jaringan WIFI	-	-		Pembelian	2015		M2	Baik	1	2.814.285,00	Microtic Router Board
267	04.16.05.01.002	4	Jaringan WIFI	-	-		Pembelian	2016		M2	Baik	1	9.200.000,00	Microtic CCR 1009-BG
268	04.16.05.01.002	1	Jaringan WIFI	-	-		Pembelian	2017		M2	Baik	1	99.800.000,00	15 Unit Sudah terpasang di beberapa titik
269	05.18.01.04.004	1	Alat Tenis Meja	-	-		Pembelian	2018			Baik	1	5.000.000,00	Meja Tenis Meja merek Butterfly
Total													8.437.673.504,00	

Mengetahui
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Metro


Dra. FARIDA, M.Si
NIP. 19661117 199203 2 003

Metro 31 Januari 2021
Pengurus Barang,


HERWAN
Nip.19700624 201001 1 002